

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi merupakan suatu sistem atau metode yang digagas dari hasil penerapan pengetahuan ilmiah yang bertujuan untuk membantu manusia melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan lebih mudah, cepat dan efisien. Perkembangan teknologi saat ini telah mengalami banyak peningkatan dan berkembang masuk kedalam berbagai aspek kehidupan dalam dua dekade terakhir. Tentunya hal ini berdampak pada berbagai perubahan besar. Pada mulanya, teknologi ini hanya berfungsi sebagai alat bantu sederhana, kini telah berevolusi menjadi elemen yang sangat menentukan dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, serta pemerintahan.

Penggunaan teknologi digital, seperti internet, perangkat pintar, aplikasi berbasis daring, hingga kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Namun, kemajuan teknologi yang begitu cepat juga memunculkan berbagai permasalahan baru. Tidak semua individu atau kelompok masyarakat mampu mengikuti perkembangan tersebut, sehingga menimbulkan kesenjangan digital (*digital divide*). Dampak dari masalah ini tidak hanya pada keterbatasan akses informasi saja, melainkan juga dalam memperbesar ketimpangan untuk memperoleh peluang ekonomi dan pendidikan.

Sementara itu, perempuan kerap diidentikan sebagai makhluk yang emosional, tidak stabil, lemah, hanya pantas bekerja di rumah atau di dapur, serta dianggap tidak layak menjadi sosok pemimpin. Berbagai stereotip negatif seperti ini masih terus melekat pada diri perempuan, bahkan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Dengan adanya stereotip ini tidak hanya mengekang potensi perempuan, tetapi juga mencerminkan konstruksi sosial yang patriarkis dan bias gender yang masih kuat mengakar dalam masyarakat.

Data McKinsey Global Institute (MGI) menemukan bahwa peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja dapat menambah Produk Domestik Bruto (PDB) global hingga USD 12 triliun pada tahun 2025 (McKinsey Global Institute,

2015). Ini menandakan bahwa keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor bukan hanya penting secara moral dan sosial, tetapi juga bisa berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dalam beberapa tahun ini juga menjadi salah satu pendorong utama perubahan pada sektor bisnis, tidak terkecuali pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya transformasi digital ini ditandai dengan semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses internet, berkembangnya *platform e-commerce*, media sosial, serta layanan keuangan digital, membuka peluang besar bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang jauh lebih luas, mengoptimalkan efisiensi operasional, dan memperkuat posisi dalam menghadapi dinamika persaingan yang semakin intens dan kompetitif.

Di Indonesia, termasuk di berbagai daerah, adopsi teknologi oleh pelaku UMKM semakin meningkat. Peluang ini menjadi semakin nyata terlihat ketika pandemi COVID-19 melanda beberapa tahun yang lalu, di mana saat itu keterbatasan aktivitas fisik mendorong percepatan digitalisasi dalam aktivitas bisnis. Dengan mengadopsi teknologi memungkinkan pelaku UMKM memiliki peluang untuk memperluas jangkauan pasar tanpa terhalangi ruang dan waktu, mempermudah proses pemasaran, serta melakukan transaksi secara daring dengan lebih aman dan efisien. Lebih dari itu, situasi ini juga bisa menjadi momentum yang strategis bagi perempuan untuk menunjukkan kapasitas dan kompetensinya, sekaligus membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang setara tidak hanya dalam sektor bisnis melainkan juga dunia pekerjaan.

Peran Perempuan dalam menggerakkan perekonomian melalui UMKM juga bisa dikatakan sangat besar. Data menunjukkan bahwa, Tahun 2023, pelaku UMKM mencapai sekitar 66 juta dengan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 61% (KADIN Indonesia, 2024). Data juga menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia merupakan Perempuan dengan angka mencapai 64,5% (BPS, 2024). Pertumbuhan yang signifikan ini berasal dari sektor UMKM yang dikelola perempuan terkhususnya dibidang makanan dan minuman. Dengan besaran angka tersebut menunjukkan dominasi perempuan dalam sektor UMKM lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata global dimana hanya satu dari tiga UMKM dimiliki oleh perempuan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan melihat data-data tersebut menyadarkan masyarakat bahwasannya peran perempuan sangat besar dalam membantu perekonomian

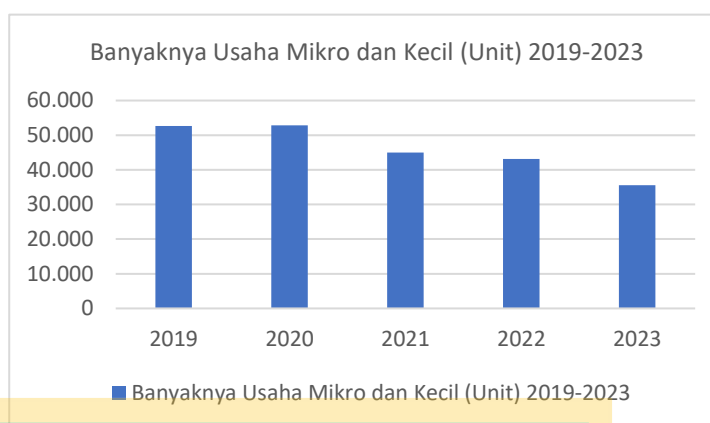
negara dan tidak bisa dilihat dengan sebelah mata (Menteri PPPA, 2024). Banyak perempuan yang memanfaatkan UMKM sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi lokal.

Namun demikian, di balik berbagai peluang yang ada, masih ditemukan sejumlah kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM terkhususnya di kalangan perempuan dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Tidak semua pelaku usaha memiliki literasi digital yang memadai untuk mengoperasikan platform digital secara optimal, mengakses pelatihan teknologi, serta memiliki keterbatasan dalam mengelola pemasaran digital dan keuangan berbasis teknologi masih menjadi hambatan yang signifikan. Kesenjangan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi berpotensi menyebabkan Sebagian pelaku UMKM mengalami ketertinggalan dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat dan kompetitif.

Perubahan pola konsumsi masyarakat yang kian bergantung pada platform digital juga menjadi faktor penting yang harus direspons dan menuntut pelaku UMKM untuk terus berinovasi dan beradaptasi. UMKM yang lambat beradaptasi dengan perubahan ini berisiko kehilangan pelanggan dan mengalami penurunan pendapatan. Oleh karena itu, melihat realitas yang ada membuat berbagai organisasi perempuan hadir untuk memberikan dukungan dan pemberdayaan, salah satunya adalah Dewan Perwakilan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPC IWAPI) Kabupaten Bogor. Sebagai organisasi yang mewadahi dan memberdayakan perempuan pengusaha, DPC IWAPI memiliki peran strategis dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas perempuan pelaku UMKM agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Melalui berbagai program pelatihan, pendampingan usaha, serta penguatan jaringan bisnis, DPC IWAPI berupaya membantu perempuan pengusaha memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, jumlah UMKM di Kabupaten Bogor menghadapi tren penurunan sejak tahun 2021. Pada tahun 2021 terjadi penurunan sebanyak 7.839 unit, disusul penurunan sebesar 1.875 unit pada tahun 2022, dan kembali menurun sebanyak 7.614 unit pada tahun 2023.

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Bogor



Sumber : BPS Jawa Barat

Penurunan ini tidak dapat dianggap sebagai isu yang tidak signifikan, melainkan harus menjadi dasar bagi dilakukannya evaluasi menyeluruh dan investigasi lanjutan terhadap faktor-faktor penyebabnya. Terkait dengan hal tersebut, kolaborasi antara stakeholder dan berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting, termasuk dengan organisasi seperti Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), mengingat sebagian besar pelaku UMKM adalah perempuan.

Ditambah lagi dengan luas wilayah Kabupaten Bogor yang mencapai $\pm 2.966,8$ km², terdiri atas 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, jangkauan tersebut tentu tidak memungkinkan untuk dikelola secara langsung oleh satu kepengurusan. Oleh karena itu, guna menjaga efektivitas organisasi, DPC IWAPI Kabupaten Bogor membentuk enam koordinator wilayah (korwil) yang masing-masing bertanggung jawab terhadap beberapa ranting di wilayahnya. Saat ini, jumlah anggota IWAPI yang telah terdaftar mencapai 245 orang yang tersebar ke dalam enam korwil, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 1.1 Jumlah Anggota DPC IWAPI Kabupaten Bogor

Koordinator Wilayah (Korwil)	Jumlah Anggota
Korwil I	76
Korwil II	40
Korwil III	38
Korwil IV	28
Korwil V	27

Korwil VI	35
Total	245 orang

Sumber : DPC IWAPI Kabupaten Bogor

Berdasarkan data distribusi anggota, terlihat bahwa Korwil I memiliki jumlah anggota terbanyak, yaitu 76 orang atau sekitar 31% dari total anggota. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut menjadi pusat konsentrasi kegiatan IWAPI di Kabupaten Bogor, sekaligus mencerminkan potensi basis ekonomi perempuan yang relatif lebih kuat dibandingkan wilayah lainnya.

Sementara itu, Korwil V tercatat memiliki anggota paling sedikit, yakni hanya 27 orang atau sekitar 11% dari keseluruhan anggota. Kondisi ini mengindikasikan perlunya strategi khusus untuk memperluas jangkauan keanggotaan, memperkuat basis organisasi, serta meningkatkan keterlibatan perempuan wirausaha di wilayah tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan perempuan oleh DPC IWAPI Kabupaten Bogor, masih terlihat beberapa kendala yang harus dihadapi. Seperti diantaranya, Pertama, aspek literasi digital dan akses terhadap teknologi rendah. Banyak pelaku UMKM di Kabupaten Bogor, khususnya perempuan, masih memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Kurangnya pemahaman akan pentingnya teknologi dalam proses operasional usaha juga menjadi kendala. Sehingga, dengan kondisi ini menghambat efektivitas pemasaran produk secara daring serta mengurangi kemampuan mereka dalam mengintegrasikan inovasi teknologi ke dalam proses operasional usaha.

Kedua, kurangnya kepercayaan diri perempuan dan rendahnya ketahanan mental pelaku UMKM dalam menggunakan teknologi baru menjadi salah satu hambatan signifikan dalam proses pemberdayaan di era digital. Keraguan tersebut tercermin dalam kekhawatiran pelaku UMKM terhadap kemungkinan memperoleh ulasan buruk di toko digital mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kendala digitalisasi tidak hanya bersifat teknis, seperti keterbatasan akses internet atau kemampuan mengoperasikan aplikasi, tetapi juga bersifat psikologis. Sehingga, pilihan untuk menggunakan metode penjualan tradisional dianggap lebih baik dan aman meskipun berpotensi membatasi perluasan pasar.

Kondisi tersebut tidak hanya menunjukkan keterbatasan dalam literasi digital, tetapi juga resistensi terhadap perubahan, di mana sebagian pelaku usaha

merasa kurang percaya diri, takut gagal, atau tidak memiliki kesiapan mental untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Jika dibiarkan, sikap ini dapat menghambat daya saing UMKM perempuan di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Dengan demikian, analisis tentang bagaimana peran IWAPI dalam memberdayakan perempuan melalui UMKM di tengah perkembangan teknologi yang pesat ini menjadi penelitian yang penting untuk dilakukan. Dengan memahami strategi, tantangan, dan dampak dari upaya pemberdayaan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas program IWAPI serta mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Peran Organisasi Perempuan dalam Pemberdayaan Pelaku UMKM di Era Digitalisasi (Studi di DPC IWAPI Kabupaten Bogor)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas pemaparan latar belakang masalah dan kondisi di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut untuk mempermudah penyusunannya: Bagaimana peran DPC IWAPI Kabupaten Bogor sebagai organisasi perempuan dalam pemberdayaan pelaku UMKM di Era Digitalisasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain untuk menjawab masalah yang telah dikemukakan sebelumnya yakni untuk mendeskripsikan peran DPC IWAPI Kabupaten Bogor sebagai organisasi perempuan dalam memberdayakan pelaku UMKM di Era Digitalisasi.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang teori *Governance* dan Administrasi Publik terkait keterlibatan organisasi perempuan sebagai aktor non-pemerintah dalam mendukung kebijakan publik di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Disamping itu,

penelitian ini juga dapat menjadi referensi atau pijakan akademis untuk penelitian selanjutnya yang menyoroti peran organisasi masyarakat sipil dalam mendukung implementasi kebijakan, pembangunan lokal, dan transformasi digital di sektor UMKM.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu dan digunakan sebagai berikut :

a. Bagi DPC IWAPI Kabupaten Bogor

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi internal untuk memperkuat perannya sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam mendukung kebijakan pemberdayaan UMKM, khususnya dalam menghadapi tantangan digitalisasi.

b. Bagi Pelaku UMKM Perempuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan publik yang dijalankan melalui kolaborasi dengan organisasi seperti IWAPI dapat meningkatkan akses terhadap pelatihan, teknologi, dan jejaring usaha serta meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan digital mereka.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam melihat serta mengetahui sistematika penulisan dalam penelitian ini maka diperlukan adanya sistematika penulisan. Berikut sistematika penulisan penelitian proposal ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini juga berisikan mengenai topik penelitian berupa Analisis Peran Organisasi Perempuan dalam Pemberdayaan Pelaku UMKM di Era Digitalisasi (Studi di DPC IWAPI Kabupaten Bogor)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat mengenai penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh orang lain dan apa yang sudah dilakukan peneliti agar

dapat membedakan dengan penelitian yang sudah ada. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai teori apa yang digunakan dalam penelitian serta juga terdapat adanya kerangka pemikiran yang menjadi alur pemikiran dari peneliti terhadap masalah yang dibahas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, memuat mengenai metode dan pendekatan yang digunakan peneliti dalam mengembangkan data dan informasi. Hal ini mencakup pendekatan penelitian yang digunakan, metode penelitian, penentuan informan, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data hingga dengan Lokasi serta jadwal penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti melakukan pembahasan dan analisis mendalam terhadap suatu permasalahan yang menjadi focus dan temuan dalam penelitian yang telah dilakukan. Pembahasan yang termuat dalam bab ini meliputi gambaran umum dari lokasi penelitian, hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan hasil penelitian secara mendalam.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan simpulan yang diperoleh dari hasil analisis pembahasan mendalam serta menjabarkan saran dan rekomendasi untuk peningkatan strategi yang nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

perempuan akan menghasilkan dampak berlipat ganda, tidak hanya memberikan dampak bagi perempuan secara individual, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan keluarga, pembangunan komunitas, dan kemajuan negara.

Pemberdayaan perempuan merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan inklusif, khususnya di sektor UMKM yang sebagian besar pelakunya adalah perempuan. Namun, ketimpangan gender serta keterbatasan akses terhadap teknologi, informasi, dan permodalan masih menjadi hambatan utama. Rendahnya literasi digital juga menghambat adaptasi perempuan pelaku UMKM di era transformasi digital. Oleh karena itu, pemberdayaan yang terintegrasi dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan menjadi urgensi untuk mendorong keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dewan Perwakilan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPC IWAPI) Kabupaten Bogor memiliki peran yang sangat strategis sebagai organisasi yang berfokus pada penguatan kapasitas perempuan pelaku usaha. DPC IWAPI hadir sebagai wadah yang tidak hanya memberikan ruang berkumpul bagi para perempuan wirausaha, tetapi juga menjadi fasilitator dalam menyediakan pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap informasi serta jaringan bisnis. Keberadaan IWAPI menjadi sangat penting dalam mendorong perempuan untuk lebih aktif, mandiri, dan mampu beradaptasi di era transformasi digital.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, perempuan pelaku UMKM membutuhkan dukungan berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital, inovasi usaha, serta daya saing di pasar yang lebih luas. Peran DPC IWAPI sebagai mitra pemerintah dalam mendukung UMKM perempuan merepresentasikan praktik *collaborative governance*. Administrasi publik modern menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat untuk mengatasi masalah yang kompleks, termasuk kesenjangan gender dalam digitalisasi. Dengan adanya kemitraan tersebut, kebijakan pemberdayaan UMKM perempuan tidak hanya lebih partisipatif, tetapi juga lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, upaya pemberdayaan perempuan yang diwujudkan melalui peningkatan literasi digital, perluasan akses jejaring usaha, serta penguatan kapasitas kewirausahaan memberikan manfaat yang berlapis. Pemberdayaan tersebut tidak hanya berimplikasi pada tumbuhnya kemandirian ekonomi perempuan secara individu, tetapi juga turut memperkuat

ketahanan keluarga, memperkuat basis komunitas, dan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, urgensi pemberdayaan perempuan sejalan dengan tujuan administrasi publik yang menekankan pada terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan penelitian ini tidak terlepas dari acuan terhadap studi-studi terdahulu yang relevan, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pembandingan dalam menyusun kerangka kajian penulis. Penelitian terdahulu itu sendiri dijadikan penulis sebagai titik acuan dalam melakukan penelitian. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu ini tidak lain sebagai upaya dalam melakukan pencarian, pengumpulan informasi hingga dengan perbandingan untuk pengembangan teori yang nantinya akan memberikan dasar yang kuat sehingga memungkinkan penulis untuk memahami konteks dan konsep yang relevan dengan subjek yang hendak diteliti.

Melalui penelitian terdahulu ini nantinya akan melahirkan sumber inspirasi dan referensi baru bagi penulis yang bisa digunakan penulis untuk memperluas dan mempertajam teori yang akan digunakan. Oleh sebab itu, berdasarkan atas temuan dari penelitian terdahulu, penulis memilih 3 (tiga) temuan penelitian sebelumnya yang relevan antara lain sebagai berikut:

Penelitian Pertama, yang dilakukan oleh Rindi Yuliyanti dan Dini Gandini Purbaningrum (2022), berjudul “Peran Non-Governmental Organization Pattiro Jakarta dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan”. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data didapatkan dari observasi lapangan, studi literatur dan kegiatan magang. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu data studi literatur, magang dan obeservasi lapangan diolah menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat tiga peranan NGO Pattiro dalam hal rehabilitasi hutan dan lahan untuk mendukung program pemerintah dalam mengatasi permasalahan hutan. Peran NGO dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk. Pertama, sebagai pelaksana, NGO menyelenggarakan kegiatan pelatihan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait konsep dan pelaksanaan RHL. Kedua, sebagai katalisator, NGO melakukan pendekatan dan kampanye untuk

membangun kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung program RHL. Ketiga, sebagai mitra kerja, NGO menjalin kerja sama dengan pihak swasta maupun donor, baik dari dalam maupun luar negeri, serta turut berperan dalam mengadvokasi isu-isu kehutanan dan lingkungan yang relevan.. Namun terdapat hambatan berupa kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan, kurangnya jumlah peneliti, kurang pendanaan dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program RHL yang kurang efektif di beberapa hal.

Penelitian Kedua, yang dilakukan oleh Rizky Madya Wulan dan Muhammad Muktiali (2013), berjudul “Peran Non-Governmental Organization (GIZ dan LSM Bina Swadaya) Terhadap Klaster Susu Sapi Perah di Kabupaten Boyolali”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran (*mixed methods*), yang mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan bersumber dari kegiatan wawancara, kuisioner, observasi serta studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara menggabungkan analisis kuantitatif menggunakan skala likert dan kualitatif menggunakan proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa peran organisasi GIZ dinilai lebih efektif, khususnya dalam meningkatkan daya saing melalui pengolahan pascapanen keju yang mampu menambah nilai ekonomi dari susu. Sementara itu, untuk organisasi Bina Swadaya menghadapi kendala terkait dengan mengontrol kebijakan pemerintah, yang berdampak pada efektivitas intervensinya. Meskipun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kedua NGO, baik GIZ maupun Bina Swadaya, perlu membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan seluruh pihak yang terlibat dalam klaster, terutama pemerintah dan para peternak sapi perah. Upaya ini penting dilakukan guna meminimalkan kesenjangan sosial di antara peternak serta mengoptimalkan potensi sektor peternakan sapi perah di Kabupaten Boyolali.

Penelitian Ketiga, yang dilakukan oleh Amalia Dwi Pertiwi, Ratih Novi Septian, Riswati Ashifa dan Prihantini (2021), berjudul “Peran Organisasi Kemahasiswaan dalam Membangun Karakter: Urgensi Organisasi Kemahasiswaan pada Generasi Digital”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian antara lain metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup proses membaca, memahami, menyimpulkan, serta mengolah dan mengembangkan informasi yang diperoleh sebagai dasar dalam menyusun hasil penelitian. Berdasarkan temuan penelitian, peran organisasi dalam membentuk karakter generasi digital dinilai sangat penting. Hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi, derasnya arus informasi, serta masuknya pengaruh budaya asing yang begitu mudah diakses oleh generasi muda. Sebagai wadah untuk mahasiswa sudah sepatutnya organisasi melakukan pengembangan karakter mahasiswa dengan memberikan pelatihan kepada mahasiswa dalam berfikir kritis, berjiwa kepemimpinan, kecerdasan emosional yang akan menyelamatkan mereka dari hal-hal negative di era globalisasi. Sebab, apabila mahasiswa tidak memiliki kemampuan tersebut, mereka akan lebih rentan terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat mengikis nilai-nilai karakter kebangsaan. Selain itu, mahasiswa juga memiliki peran strategis sebagai agen perubahan (*agent of change*), yang bertugas menjadi pengingat sekaligus teladan bagi masyarakat dalam menyikapi dan memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijak.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan sebagai rujukan

No	Nama Peneliti atau Tahun Penelitian	Judul	Materi dan Teori	Hasil
1.	Rindi Yuliyanti dan Dini Gandini Purbaningrum (2022)	Peran Non-Governmental Organization Pattiro Jakarta dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	• Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peranan NGO Pattiro dalam program rehabilitasi hutan dan lingkungan. • Metode penelitian	• Peranan NGO Pattiro dalam kegiatan rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) meliputi peran pelaksana, katalis dan mitar sudah cukup efektif. • Namun terdapat berbagai hambatan yang

			menggunakan metode studi kepustakaan. • Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi lapangan, studi literatur dan kegiatan magang. • Teknik analisis data yang digunakan yaitu data studi literatur, magang dan observasi lapangan yang diolah menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. • Kajian teori yang digunakan meliputi Non-Governmental Organization (NGO), dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).	harus dihadapi NGO seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan, kurangnya jumlah peneliti, kurang pendanaan dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program RHL yang kurang efektif di beberapa hal karna kurangnya edukasi masyarakat.
--	--	--	---	---

(Sumber: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Universitas Muhammidayah Jakarta)



2.	Rizky Madya Wulan dan Muhammad Muktiali (2013)	Peran Non-Governmental Organization (GIZ dan LSM Bina Swadaya) Terhadap Klaster Susu Sapi Perah di Kabupaten Boyolali	• Tujuan dari penelitian ini untuk memahami peranan yang dilakukan NGO (GIZ dan Bina Swadaya) dalam klaster dan mengukur efektivitas peran yang dilakukan NGO dalam klaster susu sapi perah. • Metode penelitian dan Teknik analisis data menggunakan metode gabungan atau <i>mix methods</i>. • Teknik pengumpulan data menggunakan cara pembagian kuisioner, wawancara, observasi dan studi dokumentasi. • Kajian teori yang digunakan meliputi klister	• Keterlibatan GIZ dalam klaster lebih kepada pendampingan secara teknis karena GIZ dalam klaster bertindak sebagai <i>technical assistant</i>, sedangkan Bina Swadaya dalam klaster lebih terfokus pada pemberdayaan pelaku usaha melalui proses pendampingan. • Diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi antara NGO dengan pihak yang terlibat dalam klaster yang tidak mungkin apabila pendampingan kepada peternak dibebankan pada satu NGO.
----	--	---	--	---

(Sumber: Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Universitas Diponegoro)

			dan Non-Governmental Organization (NGO).	
3.	Amalia Dwi Pertiwi, Ratih Novi Septian, Riswati Ashifa dan Prihantini (2021) (Sumber: Aulad: Journal on Early Childhood, Universitas Pendidikan Indonesia)	Peran Organisasi Kemahasiswaan dalam Membangun Karakter: Urgensi Organisasi Kemahasiswaan pada Generasi Digital	• Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran organisasi kemahasiswaan dalam membangun karakter khusus pada generasi digital. • Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskripsi dan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis isi atau <i>content analysis</i>. • Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur • Kajian teori yang digunakan meliputi teori	• Di era digital saat ini, peran organisasi sangat penting dalam pengembangan karakter mahasiswa, khususnya pengembangan kemampuan berfikir kritis. • Upaya yang dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan webinar baik untuk seluruh mahasiswa ataupun anggota organisasi atau kegiatan lainnya yang bisa melatih kemampuan soft skill mahasiswa.

			organisasi, peran, kehidupan digital, dan karakter.	
--	--	--	---	--

2.3 Kerangka Teori

2.3.1 Teori Peran Organisasi

Teori peran merupakan teori yang menjelaskan bagaimana suatu individu dapat menjalankan fungsi atau perilakunya sesuai dengan posisinya sebagai tokoh didalam suatu lingkungan (Sarwono, 2015). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran merujuk pada sekumpulan perilaku yang seharusnya dimiliki dan dilaksanakan oleh individu berdasarkan posisi atau status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun dalam Bahasa Inggris peran yaitu *Role* dalam kamus *oxford dictionary* diartikan sebagai “*Actor’s part*”, *One’s task or function*” yang memiliki makna actor, tugas seseorang atau fungsi.

Seseorang dapat dikatakan menjalankan peranannya ketika dia dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, karena peran atau *role* merupakan aspek dinamis dari adanya kedudukan atau status. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang memiliki hubungan saling berkaitan dan memiliki hubungan ketergantungan satu sama lain. Peranan senantiasa mencerminkan adanya fungsi, kemampuan beradaptasi, serta berlangsung sebagai suatu proses. Dengan demikian, peranan dipandang sebagai aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi sosial yang dimilikinya, maka ia telah melaksanakan peranannya. (Soerjono Soekanto, 2009).

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Bruce J Chohen yang dikutip oleh Mutiawanti, peran merupakan suatu perilaku yang diharapkan oleh orang

lain dari seseorang yang menduduki status tertentu (Mutiawati, 2017). Lebih lanjut Riyadi menjelaskan bahwasannya peran diartikan sebagai suatu orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial (Riyadi, 2002). Melalui peran yang dijalankan, baik individu maupun organisasi dapat berperilaku sesuai dengan harapan sosial maupun norma yang berlaku dalam lingkungannya. Peran juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk tuntutan yang muncul secara struktural, sejalan dengan posisi atau kedudukan yang dimiliki dalam suatu sistem sosial.

Menurut Levy (dalam Soekanto, 2013), pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat :

1. Peran-peran tertentu perlu dijalankan agar struktur sosial dalam masyarakat dapat terus terjaga dan berfungsi secara berkelanjutan.
2. Peran tersebut idealnya dijalankan oleh individu yang oleh masyarakat dianggap memiliki kapasitas dan kompetensi untuk melaksanakannya.
3. Namun demikian, dalam realitas sosial kerap dijumpai individu yang tidak mampu memenuhi ekspektasi masyarakat dalam menjalankan peran yang diembannya .

Sementara itu, Organisasi berasal dari Bahasa Yunani “Organon” yang berarti alat. Dalam Bahasa Latin, Organisasi yaitu “Organum” yang berarti Badan. Dalam bahasa Inggris, Organisasi berasal dari “organize” diartikan sebagai menyusun atau mengatur bagian-bagian yang terpisah menjadi satu kesatuan yang terstruktur, sehingga dapat berfungsi secara efektif dalam menjalankan suatu pekerjaan atau tujuan tertentu. (Sesra Budio, 2018).

Menurut beberapa ahli, Eliana sari mengutip pengertian organisasi, Organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Stephen Robins, Organisasi merupakan suatu kesatuan sosial yang terkoordinasi secara sadar, memiliki struktur kepemimpinan yang dapat diidentifikasi, dan beroperasi secara sistematis guna mencapai tujuan bersama atau tujuan yang dimiliki oleh sekelompok individu.
2. James D. Money, Organisasi merupakan suatu bentuk perkumpulan manusia untuk mencapai tujuan Bersama.
3. Chester I. Barnard, Organisasi dapat diartikan sebagai wadah kerja sama antara dua pihak atau lebih yang disusun secara formal dan sistematis guna mewujudkan tujuan yang telah disepakati bersama.

4. Sondan P. Siagian, Organisasi merupakan bentuk kolaborasi dari sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, serta terikat dalam suatu struktur formal yang bersifat hierarkis. Di dalamnya terdapat hubungan kerja yang terorganisir antar anggota untuk mencapai tujuan bersama. (Eliana Sari, 2006)

Herbert A. Simon, Donald W. Stmithburg, dan Victor A. Thompson mendefinisikan Organisasi dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terstruktur dalam bentuk kerja sama, di mana setiap anggotanya memiliki peran, kontribusi, dan kewajiban yang diakui serta harus dijalankan secara bertanggung jawab. (Syamsu Q. Badu dan Novianty Djafri, 2017). Berdasarkan beberapa penjabaran diatas maka Organisasi merupakan suatu himpunan individu yang bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan bersama. Organisasi juga berfungsi sebagai wadah untuk merancang dan mewujudkan berbagai bentuk aktivitas yang sejalan dengan tujuan yang telah disepakati.

Dalam sebuah organisasi, peran merupakan pondasi utama yang menentukan efektivitas, arah, dan keberlangsungan kegiatan organisasi. Setiap individu atau kelompok yang terlibat di dalam organisasi memegang tanggung jawab tertentu yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan berbagai teori yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan fungsi sosial dan status yang dimilikinya. Setiap peran yang diemban sebaiknya dapat dijalankan secara optimal, baik dalam konteks organisasi, individu, maupun masyarakat. Seseorang dianggap telah menjalankan perannya dengan baik apabila ia mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang, karena keduanya merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari status sosial yang melekat padanya.

2.3.2 Teori *Non-Governmental Organization* (NGO)

Organisasi merupakan suatu wadah yang terdiri atas sekelompok individu yang bekerja sama secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Menurut Stephen P. Robbins, Organisasi merupakan bentuk kolaborasi dari sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, serta terikat dalam suatu struktur formal yang

bersifat hierarkis. Di dalamnya terdapat hubungan kerja yang terorganisir antar anggota untuk mencapai tujuan bersama (Stephen P. Robbins, 1994). Berdasarkan tujuan berdirinya organisasi, secara garis besar, terbagi menjadi dua yaitu bertujuan untuk melayani kepentingan publik dengan berciri non-profit atau tidak mencari keuntungan dan bertujuan melayani kepentingan publik namun berorientasi pada profit atau keuntungan (Desna Aromatica dkk, 2021).

Organisasi yang berciri mencari profit atau menghasilkan keuntungan finansial biasanya merupakan organisasi niaga seperti Perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi dan lain sebagainya. Sementara untuk organisasi yang berciri non-profit atau tidak mencari keuntungan merupakan organisasi yang berfokus pada pelayanan publik atau organisasi public seperti yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemanusiaan dan lain sebagainya.

Secara umum organisasi publik diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu Organisasi Pemerintah (*Governmental Organization*) dan Organisasi Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organization*). Organisasi Pemerintah (*Governmental Organization*) merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi pemerintah. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan atau non-profit. Seperti Kementerian dan dinas pemerintah.

Organisasi non Pemerintah atau *Non-Governmental Organization* (NGO) merupakan suatu organisasi independen atau mandiri yang dalam pelaksanaannya tidak berada secara langsung dalam struktur pemerintah. Istilah NGO mulai diperkenalkan dan digunakan secara resmi dalam Piagam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Pada masa itu, istilah NGO digunakan untuk membedakan antara lembaga-lembaga pemerintahan (*intergovernmental agencies*) dan organisasi swasta internasional (*international private organizations*), khususnya dalam konteks partisipasi dan konsultasi dalam lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Di Indonesia, penggunaan istilah NGO ini dimulai sejak tahun 1998 seiring dengan meningkatnya jumlah organisasi non-pemerintah, terkenal dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). NGO merupakan

organisasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara luas tanpa berorientasi pada keuntungan (*non-profit*). Organisasi ini dapat didirikan oleh individu maupun kelompok, dan berfokus pada kegiatan sosial, kemanusiaan, atau pembangunan yang bersifat independen. (Praja, 2009). Sehingga, seringkali organisasi ini didirikan sebagai bentuk upaya dalam mengatasi masalah sosial, kemanusiaan, lingkungan atau isu-isu tertentu yang membutuhkan perhatian lebih.

Non-Governmental Organization (NGO) atau Organisasi Non-Pemerintah juga dapat diartikan sebagai sebuah organisasi, lembaga, atau kelompok yang berperan aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bentuk partisipasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan, khususnya yang menyangkut kelompok masyarakat pada lapisan bawah. (Nugroho, 2001).

David Lewis dan Nazneen Kanji dalam bukunya yang berjudul “*Non-Governmental Organization and Development*” mengklasifikasikan peranan NGO kedalam 3 hal (David Lewis dan Nazneen Kanji, 2009), diantaranya:

1. Peran sebagai *Service Delivery* atau *Implementers*

Peranan NGO sebagai *Service Delivery* atau *Implementers* memiliki arti bahwa NGO berperan untuk melakukan mobilisasi atau penggerakan terhadap berbagai sumber daya dalam penyediaan barang dan jasa bagi orang-orang yang membutuhkan. Upaya ini dilakukan NGO untuk menunjang berbagai isu-isu yang bermunculan di berbagai sektor seperti sektor kesehatan, keuangan, pertanian, lingkungan hidup, hak asasi manusia, bantuan dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya, peran *Service Delivery* atau *Implementers* diwujudkan berupa respon dengan aksi dengan menyediakan bantuan berupa pelayanan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat. Pelayanan dapat diberikan langsung kepada masyarakat, terutama ketika layanan belum tersedia atau masih terbatas. Dalam hal ini, banyak NGO yang berperan sebagai *implementer* atau penyedia layanan memilih untuk bermitra dengan pemerintah guna memperkuat kualitas dan cakupan pelayanan secara keseluruhan. Kegiatan yang kerap kali dilakukan bisa berupa pengadaan pelatihan atau penelitian kepada pemerintah, swasta, ataupun masyarakat. Peran NGO dalam aspek pelayanan cenderung menjadi lebih

dominan ketika terdapat peningkatan tekanan atau tuntutan terhadap organisasi tersebut untuk merespons situasi darurat akibat ulah manusia, seperti isu-isu lingkungan atau bencana alam, terutama dalam konteks aksi-aksi kemanusiaan.

2. Peranan sebagai Katalis atau *Catalysts*

Peranan NGO sebagai katalis atau *Catalysts* memiliki arti bahwasannya NGO merupakan sebagai agen perubahan atau *agent of change* yang dapat menginspirasi, memfasilitasi dan berkontribusi dalam mempromosikan norma serta nilai baru dan membuat adanya perubahan dalam setiap masalah yang ada. Sederhananya, Peran ini dimaknai sebagai kemampuan NGO untuk mendorong terjadinya perubahan, baik melalui kegiatan advokasi maupun melalui inovasi dalam merumuskan solusi baru terhadap suatu permasalahan. Peran ini dapat diwujudkan dalam beberapa cara seperti inovasi, advokasi, serta melalui *watchdog*. Advokasi dalam hal ini berkaitan dengan *partnerships* dimana NGO dapat melakukan kolaborasi dengan pemerintah secara langsung untuk mengubah paradigma mereka. Advokasi ini menjadi strategi NGO dalam meningkatkan efektivitas dan dampak kerjanya di sebuah negara. NGO dalam advokasi dapat menjadi actor “Policy Entrepreneur” dimana terdapa tiga tahapan yang dilalui mulai dari agenda setting, policy development dan policy implementation. Kemampuan untuk berinovasi kerap dianggap sebagai kualitas khusus, bahkan sering diposisikan sebagai keunggulan komparatif. Inovasi yang dihasilkan oleh LSM dapat menjadi sarana efektif bagi masyarakat untuk keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Setelah menemukan inovasi tersebut, NGO biasanya melanjutkan langkahnya dengan melakukan advokasi kepada pemerintah serta memberikan pelatihan agar pemerintah mampu mengadopsi dan menjaga keberlanjutan penggunaan inovasi tersebut oleh para aparatur di berbagai wilayah, sehingga manfaatnya dapat diperluas secara lebih merata. Sementara itu, peran sebagai *catalyst* juga dapat dijalankan melalui *watchdog*, yakni ketika NGO berperan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah tertentu agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan yang telah ditetapkan.

3. Peranan sebagai Mitra Kerja atau *Partnerships*

Peranan sebagai Mitra Kerja atau *Partnerships* memiliki arti bahwasannya dalam pelaksanaannya NGO berupaya untuk melakukan hubungan kerjasama dengan beberapa pihak mulai dari mitra kerja lain atau pemerintah sekaligus menanggung risiko bersama dengan mitranya. Peran tersebut merepresentasikan kecenderungan baru di mana NGO berkolaborasi secara aktif dengan pemerintah, lembaga donor, dan sektor swasta dalam menyusun dan menjalankan program kolaboratif, baik dalam skala besar maupun dalam bentuk proyek-program tertentu.

Kerjasama atau kolaborasi yang dilakukan antara NGO dengan pemerintah bertujuan untuk menangani suatu permasalahan tertentu dimana kadangkala kebijakan atau program pemerintah tidak berjalan dengan baik. Bagi NGO tentunya peranan ini menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi guna membangun hubungan saling menguntungkan yang efektif, responsif dan tidak berkegantungan. Bentuk dari *Partnership* ini tercermin melalui kolaborasi yang dilakukan NGO dengan pemerintah maupun sektor swasta dalam pengembangan program *Capacity Building*, yang bertujuan untuk meningkatkan serta memperkuat kapasitas baik NGO ataupun masyarakat yang menjadi sasarannya.

Dengan menjalankan ketiga peran tersebut, NGO dapat mengambil langkah strategis dalam merespons berbagai isu yang memberi manfaat bagi pihak-pihak terkait. Namun, sebuah NGO bisa juga hanya melakukan salah satu perannya saja, tetapi bisa juga melakukan ketiga perannya sekaligus (David Lewis & Nazneen Kanji, 2009).

2.3.3 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan dalam membangun dan mendorong kemampuan Masyarakat dalam menghidupkan kembali kesadaran terhadap kemampuan yang dimilikinya serta memiliki kemauan untuk merealisasikan hasil dari pengembangan potensi tersebut dengan nyata. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ginandjar Kartasasmita, bahwa pemberdayaan dapat dipahami sebagai proses penguatan kapasitas masyarakat yang dilakukan dengan cara memotivasi, mendorong, dan membangkitkan kesadaran mereka terhadap potensi yang dimiliki, serta

mengarahkan potensi tersebut agar dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. (Ginandjar Kartasasmitha, 1996).

Suhendra, mengartikan pemberdayaan merupakan proses yang terus berkembang dan dilakukan secara kolaboratif, dengan melibatkan seluruh potensi yang ada secara bertahap, terarah, dan berkelanjutan guna mencapai perubahan yang signifikan. (Suhendra, 2006). Senada dengan penjelasan Suhendra, menurut Miniarni, Utami, dan Prihatiningsih, menjelaskan bahwa Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai usaha sistematis untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat melalui pemberian motivasi, dorongan, serta pembangkitan kembali kesadaran akan potensi yang ada, serta mengupayakan penguatan dan pengembangannya agar lebih optimal (Miniarni, Utami, dan Prihatiningsih, 2017).

Sehingga, menurut Zakiyah, pemberdayaan perempuan merupakan proses transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi pada empat tingkat berbeda, yaitu dalam lingkup keluarga, masyarakat, pasar, dan negara. (Zakiyah, 2010). Dalam konteks pemberdayaan, peran organisasi yang dimuat kedalam empat hal (Zubaedi, 2013), diantaranya ialah:

1. *Faciliative Roles*

Dalam upaya pemberdayaan, peran ini dijalankan dengan memberikan adanya dorongan atau motivasi dan pendampingan yang memungkinkan masyarakat mengembangkan kapasitas atau kemampuannya serta mengelola potensi secara mandiri. Peran ini dapat diwujudkan dalam bentuk memberi semangat (*social animation*), menjadi penengah atau penghubung (*mediation dan negitation*), mendorong (*support*), membangun kesepakatan (*building consensus*), memfasilitasi kelompok (*group facilitation*), penggunaan keterampilan dan sumber-sumber (*utilization of skill and resources*) dan pengoorganisasian (*organizing*). Dalam hal ini, peranan IWAPI dapat terlihat ketika organisasi tersebut dapat menciptakan adanya iklim atau suasana yang dapat membuat kemampuan perempuan meningkat.

2. *Educational Roles*

Peran yang dijalankan organisasi dalam hal ini berkaitan dengan peran-peran yang berhubungan dengan memberikan Pendidikan atau

education. Dalam upaya pemberdayaan, kegiatan edukasi diselenggarakan secara berkelanjutan, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun oleh para pekerja sosial masyarakat. Tujuannya antara lain untuk terus memperbarui keterampilan, pola pikir, cara berinteraksi, serta kemampuan dalam menghadapi berbagai permasalahan. Dalam hal ini, peran ini dapat diwujudkan dalam bentuk membangun kesadaran (*consciousness raising*), memberikan pemahaman atau penjelasan (*informing*), menghadapi adanya pertentangan di masyarakat (*confronting*), dan melaksanakan pelatihan (*training*).

Dalam hal ini, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan oleh organisasi dengan cara memberikan kesempatan bagi mereka secara luas dan bebas untuk dapat menempuh pendidikan seluas mungkin. Kebutuhan ini muncul mengingat masih dominannya persepsi sosial terkait dengan pendidikan perempuan, bahwa mereka pada akhirnya hanya akan berperan di ranah rumah tangga. Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) pendidikan bagi perempuan (Salman, 2005).

Dengan adanya peranan ini, perempuan akan diberikan pengetahuan terkait dengan kesadaran akan pentingnya memiliki pemikiran yang kritis dan dipersilahkan untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya melalui kampanye yang bertujuan untuk memberhentikan berbagai macam ketidakadilan gender. Disamping itu, diperlukan juga adanya pengetahuan dan program aksi yang didapatkan perempuan agar mereka dapat secara mampu membatasi masalahnya sendiri (Fakih, 2016)

3. *Representational Roles*

Peran ini dijalankan oleh pekerja sosial masyarakat melalui interaksi dengan lembaga eksternal, mewakili kepentingan masyarakat dan bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi dan demi kepentingan kolektif yang mereka wakili. Dalam hal ini, peran organisasi dapat diwujudkan dalam bentuk usaha mendapatkan sumberdaya, pembelaan masyarakat atau advokasi, menjalin hubungan kemitraan, berbagi pengetahuan ataupun pengalaman hingga dengan menjadi perwakilan

bagi masyarakat untuk berbicara. Peran ini menekankan organisasi untuk dapat mengangkat permasalahan perempuan dengan menggerakkan kampanye untuk menghentikan ketidakadilan gender kepada masyarakat di publik.

Sementara itu, istilah pemberdayaan perempuan, memberdayakan perempuan juga dimaknai dengan melindungi. Artinya, dalam proses pemberdayaan organisasi harus dapat mencegah yang lemah menjadi semakin lemah. Sehingga, diperlukan juga adanya langkah-langkah ataupun cara pasti dalam merealisasikannya menjadi nyata. Tanpa adanya cara pasti maka upaya untuk melakukan pemberdayaan perempuan akan mengalami berbagai hambatan atau kendala (Sumodiningrat, 1997).

4. *Technical Roles*

Dalam upaya pemberdayaan, disini organisasi memiliki peranan yang bertujuan untuk mengaplikasikan keahlian teknis dalam membangun masyarakat. Terdapat beberapa dimensi dalam peranan organisasi seperti diantaranya analisis data atau pengumpulan data, penggunaan komputer, penyampaian laporan baik berbentuk verbal atau non-verbal, pembangunan secara fisik, manajemen dan pengendalian uang sangat membutuhkan keterampilan teknis

Tujuan dari adanya peran ini antara lain ialah untuk memperkuat daya atau potensi dimiliki masyarakat (*empowering*). Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya upaya serta strategi yang pasti, nyata dan positif, penyediaan informasi, bimbingan, dan akses terhadap peluang bertujuan untuk memperkuat kemampuan masyarakat agar lebih berdaya dalam mengenali dan memanfaatkan potensi yang ada. (Sumodiningrat, 1997). Peran ini dapat diwujudkan melalui pemberian berbagai keterampilan kepada perempuan, guna mendorong produktivitas dan kemandirian mereka, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada laki-laki. Keterampilan yang dapat diajarkan meliputi menjahit, menyulam, serta berwirausaha melalui pembuatan kain batik dan aneka produk makanan. (Salman, 2005).

2.3.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan bentuk usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha, dengan klasifikasi tertentu yang didasarkan pada besaran aset dan pendapatan tahunan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun tujuan dari berdirinya UMKM ialah menguatkan dan memperluas kegiatan usaha guna berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional yang berpijak pada sistem demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Secara tidak langsung, UMKM juga menjadi salah satu bentuk upaya kesejahteraan sosial yang dikembangkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia.

Bersandarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 menyatakan bahwa UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah bentuk usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha dengan skala tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam regulasi perundang-undangan.
2. Usaha Kecil adalah unit ekonomi produktif yang dijalankan oleh perorangan maupun kelompok, baik atas nama diri sendiri maupun badan hukum mandiri, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari Usaha Menengah maupun Usaha Besar, dan memenuhi kriteria kapasitas usaha kecil sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Usaha Menengah merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri secara mandiri dan dijalankan oleh individu atau badan usaha, yang tidak berstatus sebagai anak perusahaan, cabang, atau bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari Usaha Kecil maupun Usaha Besar, serta memiliki kriteria kekayaan bersih atau omzet tahunan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Adapun kriteria dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam struktur perekonomian nasional. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi salah satu instrumen penting dalam mendistribusikan pendapatan secara lebih merata di masyarakat. Sebagai motor penggerak ekonomi rakyat, UMKM berkontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi lokal serta mendukung pertumbuhan ekonomi

inklusif.

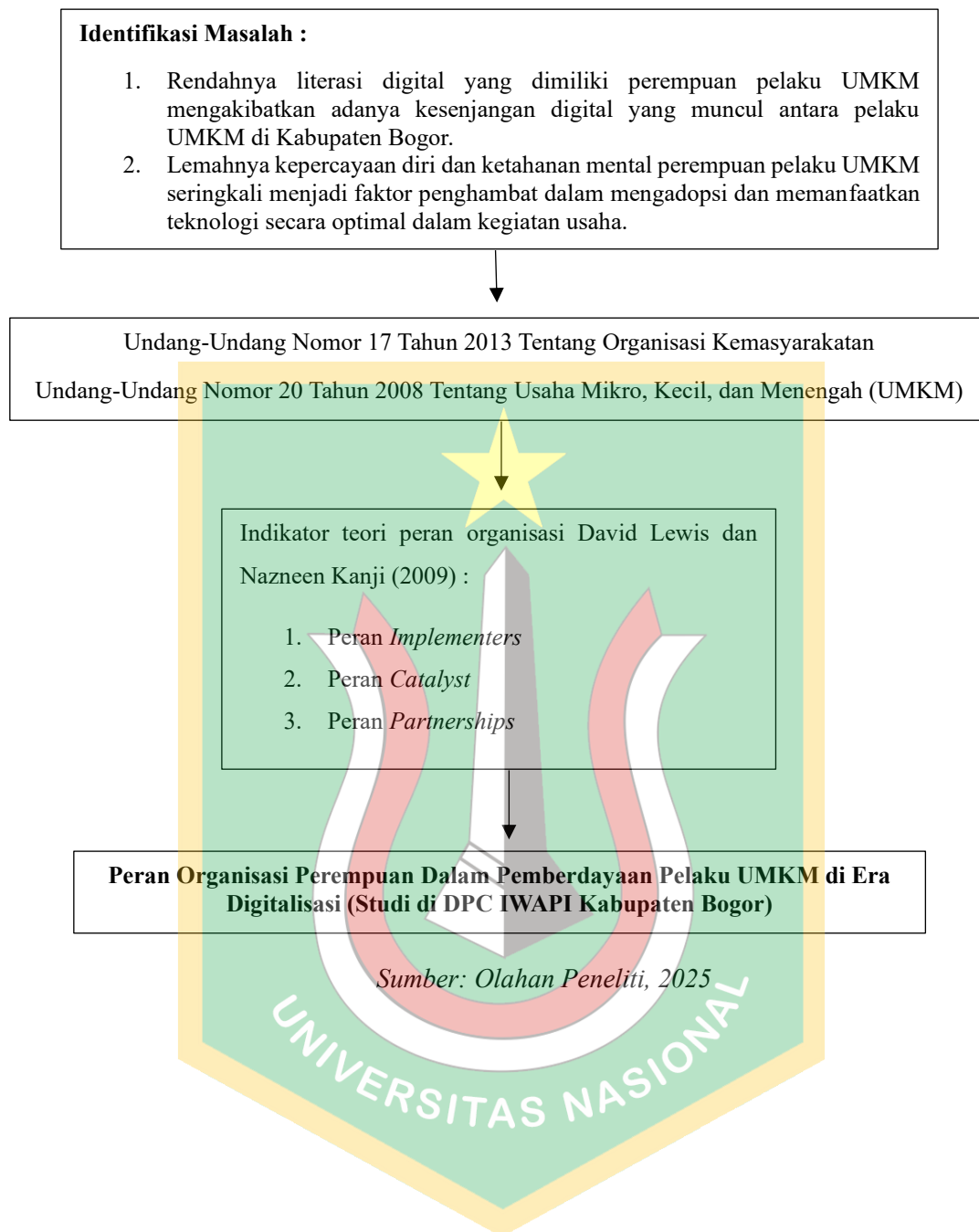
Lebih dari itu, UMKM juga berfungsi sebagai pintu masuk bagi kelompok-kelompok marjinal, termasuk perempuan, untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi formal. Dengan karakteristiknya yang fleksibel dan berbasis komunitas, UMKM memberikan ruang bagi perempuan untuk mengembangkan potensi kewirausahaan sekaligus menjalankan peran domestik yang melekat secara kultural. Dalam konteks ini, UMKM tidak hanya berperan dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam proses pemberdayaan sosial dan kesetaraan gender.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan sebuah model konseptual yang membantu dalam menguraikan hingga dengan mengorganisasikan informasi, gagasan atau masalah. Kerangka pemikiran ini sangat membantu penulis dalam menghubungkan ide-ide utama dalam penelitian dengan kerangka teoritis yang sudah ada serta memberikan landasan yang kuat bagi penelitian penulis. Menurut Sugiyono, Kerangka pemikiran atau Kerangka berpikir merupakan hasil sintesis yang menunjukkan hubungan logis antara variabel-variabel dalam penelitian, yang digunakan sebagai landasan untuk menjawab permasalahan dan merumuskan hipotesis. Umumnya, kerangka ini dituangkan dalam bentuk diagram yang dilengkapi dengan uraian kualitatif. (Sugiyono, 2017).

Sehingga, dalam hal ini kerangka pemikiran merupakan suatu alur yang dibuat secara logis dan sistematis yangmana kemudian menghasilkan adanya suatu kesimpulan. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa tujuan yang mencakup untuk dapat mengetahui, melakukan analisa serta mendeskripsikan terkait dengan Analisis Peran Organisasi Perempuan dalam Pemberdayaan Pelaku UMKM di Era Digitalisasi (Studi di DPC IWAPI Kabupaten Bogor) dengan menggunakan kerangka pemikiran, sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis permasalahan yang diangkat, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai dengan topik penelitian, yakni untuk menggali makna, memahami konteks sosial, serta memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelurusan yang digunakan guna mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Creswell, 2008). Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena dalam konteks alaminya, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi, dianalisis secara induktif, dan lebih berfokus pada makna mendalam dari suatu gejala sosial daripada menghasilkan generalisasi yang luas. (Zuhri Abdussamada, 2021).

Metode pengumpulan data melibatkan adanya wawancara secara mendalam, kegiatan observasi serta juga analisis dokumen. Tujuan utama dari penggunaan metode ini adalah untuk mengungkap perspektif para informan, memahami dinamika peran organisasi perempuan dalam konteks pemberdayaan ekonomi, serta menelaah berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas program yang dijalankan. Selain itu, tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk fenomena sosial, peristiwa, aktivitas, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pola pikir, baik pada tingkat individu maupun kelompok (Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, 2012).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif-analitis dan menggambarkan secara komprehensif realitas sosial yang terjadi di lapangan. Menurut Moleong, Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berupaya memahami secara mendalam pengalaman subjektif subjek penelitian, meliputi perilaku, persepsi, motivasi, dan Tindakan, dalam konteks alamiah tertentu. Data disajikan dalam bentuk deskriptif melalui narasi verbal, dengan menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat natural dan kontekstual. (Moleong, 2011).

Berdasarkan atas pengertian menurut para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap subjek penelitian, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengamati dan memahami suatu peristiwa. Hasil dari pendekatan ini disajikan dalam bentuk narasi deskriptif berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada makna mendalam dari suatu fenomena dibandingkan pada upaya generalisasi.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti dapat mengeksplorasi secara menyeluruh peran DPC IWAPI Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kapasitas perempuan pelaku UMKM di era digitalisasi. Sehingga, peneliti berpandangan bahwa pendekatan kualitatif relevan untuk digunakan dalam penelitian ini, mengingat kemampuannya dalam menggali permasalahan secara komprehensif dan kontekstual sesuai dengan fokus kajian yang ditetapkan.

3.2 Penentuan Informan

Informan ataupun narasumber merupakan seorang individu ataupun kelompok yang memberikan berbagai informasi terkait dengan permasalahan yang sedang peneliti lakukan. Sugiyono menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, informan atau narasumber berperan sebagai sumber utama informasi, karena mereka dianggap memahami isu yang diteliti dan mampu menyampaikan data sesuai dengan latar situasi yang sedang dikaji. (Sugiyono, 2018).

Informan atau narasumber ini merupakan seseorang yang memang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai keadaan terkini terhadap subjek penelitian yang akan diteliti dan yang dapat menjelaskannya. Hal ini didukung dengan penjelasan Moleong, bahwa Informan merupakan individu yang berperan dalam menyampaikan data atau informasi yang relevan dengan konteks dan latar penelitian. Hal ini menjadikan kehadiran informan membantu peneliti dalam menggali berbagai aspek yang menjadi fokus penelitian secara lebih komprehensif. (Moleong, 2012).

Schwandt dalam sarwono mendefinisikan informan sebagai pihak dari dalam atau *Insiders* yang berpengetahuan dan membantu petugas lapangan dalam memperoleh, menjaga akses, mengembangkan pemahaman informan, dan melakukan pengecekan mengenai pemahaman yang muncul saat riset dijalankan (Sarwono, 2013). Sehingga, informan ini juga berfungsi sebagai pembantu di

lapangan, sebagai pemberi keterangan, penuntun, dan penyedia informasi bagi petugas lapangan saat peneliti tidak mengalami kejadian yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, informan yang diperlukan dibagi menjadi tiga kategori diantaranya penyedia informasi kunci, informasi utama, dan informasi pelengkap atau tambahan. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa informan kunci menurut penulis adalah seseorang yang bersedia untuk dimintai informasi karena ia merupakan seseorang yang memiliki pemahaman serta pengetahuan yang cukup terhadap objek yang diteliti dan juga memiliki berbagai data yang valid. Tujuan dari adanya informan kunci ini antara lain ialah untuk menjadikan data serta informasi yang didapatkan memiliki kredibilitas. Dalam hal ini informan kunci yang ditetapkan penulis diantaranya:

Tabel 3.1 Informan Peneliti

No	Keterangan	Informan	Alasan Dipilih
1.	Informan Kunci	Ketua Umum DPC IWAPI Kabupaten Bogor	Dipilih karena memiliki peran strategis dalam mengarahkan kebijakan dan program organisasi secara menyeluruh.
2.	Informan Utama	Wakil Ketua Umum I Bidang Organisasi, Keanggotaan, & Kesekretariatan	Dipilih karena berperan dalam penguatan struktur organisasi dan pengembangan anggota, serta mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perubahan, termasuk digitalisasi.
		Wakil Ketua Umum IX CSR & Sosial	Dipilih karena bertanggung jawab dalam menjalin kerja sama eksternal, baik dengan sektor publik maupun swasta.
3.	Informan Pendukung	Anggota DPC IWAPI Pelaku UMKM	Pihak-pihak yang terdampak dan menerima manfaat secara langsung.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari sumber data guna menjawab masalah dari penelitian. Hal ini sejalan dengan pemikiran sugiyono bahwasannya langkah pertama atau langkah utama yang harus dilakukan dalam penelitian ialah Teknik pengumpulan data. Hal ini dikarenakan, tanpa peneliti mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan bisa mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditentukan (Sugiyono, 2016).

Menurut Arikunto, teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai teknik, seperti wawancara, observasi, studi dokumentasi, angket, serta metode lainnya, yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian dan karakteristik objek yang dikaji. (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis bersumber dari data primer dan data sekunder. Arikunto mendefinisikan bahwa data primer adalah informasi asli yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian melalui interaksi verbal, bahasa tubuh, atau tindakan nyata. Subjek atau informan dalam hal ini memiliki keterkaitan langsung dengan variabel penelitian, sehingga dianggap mampu memberikan data yang valid. (Arikunto, 2013). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui metode wawancara mendalam. Metode ini dilakukan melalui percakapan antara peneliti dan informan dengan tujuan menggali informasi atau data yang relevan. Sebelum pelaksanaan wawancara, peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, yang disusun berdasarkan kebutuhan penelitian dan tujuan yang ingin dicapai.

Sementara itu, data sekunder didefinisikan sebagai data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis, berupa tabel, catatan, notulen rapat, benda-benda dan lain sebagainya, foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain sebagainya yang bertujuan untuk dapat memperkaya data primer (Arikunto, 2013). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, dokumen-dokumen dan studi lapangan. Sementara itu, untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis ialah dengan menggunakan pendekatan deskriptif dimana penulis merasa bahwa pendekatan ini sangat tepat untuk digunakan dalam penelitian.

Pemilihan teknik pengumpulan data sangatlah penting untuk dilakukan oleh seorang penulis dimana hal ini sangat mempengaruhi bagaimana informasi itu dikelola. Oleh karena itu, tujuan utama dari adanya teknik pengumpulan data ini antara lain ialah untuk mengubah informasi yang telah diperoleh menjadi data yang valid. Selanjutnya, teknik yang digunakan penulis dalam melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi untuk mendapatkan data primer dan sekunder, diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan adanya interaksi langsung antara peneliti dengan responden. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara terbuka dan diawali dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kelompok responden yang telah ditentukan. Setiap pertanyaan ini sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis. Tujuan dari teknik wawancara ialah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain serta untuk mengetahui bagaimana pandangannya tentang dunia yang mana hal ini tidak bisa peneliti ketahui hanya dari observasi. Kelebihan dari penggunaan teknik ini antara lain ialah penulis akan mendapatkan informasi yang mendalam, memahami perspektif, dan pengalaman unik dari setiap responden. Serta juga memberikan kesempatan bagi responden untuk memberikan klarifikasi terhadap pertanyaan yang disampaikan.

2. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan. Observasi ini bisa dilakukan bersamaan dengan waktu wawancara di lapangan atau dilakukan sebelumnya. Sehingga, observasi dikatakan sebagai cara yang efektif dalam pengumpulan data karena secara langsung kita bisa mengetahui fakta atau kenyataan apa yang terjadi di lapangan.

3. Teknik Dokumentasi

Arikunto menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen tertulis atau tercetak,

seperti laporan, buku, arsip, surat kabar, majalah, transkrip wawancara, notulen, serta dokumen administratif lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian (Arikunto, 2020). Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai catatan atau peristiwa yang sudah berlalu sesuai dengan yang diteliti peneliti. Dokumen yang digunakan dalam teknik dokumentasi dapat berupa data tertulis, visual (seperti foto atau ilustrasi), maupun karya monumental yang dihasilkan oleh individu dan memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti.

3.4 Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengelompokan data, reduksi ke dalam bagian-bagian penting, integrasi atau sintesis informasi, pengidentifikasian tema-tema utama, dan penarikan kesimpulan yang bermakna bagi proses interpretasi dan pemahaman terhadap objek penelitian. Analisis data bertujuan untuk mentransformasi data mentah menjadi informasi yang terstruktur dan signifikan, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara logis dan sistematis. Melalui proses ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola, hubungan, atau tema yang muncul dari data, sehingga memperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap fenomena yang diteliti.

Selain itu, analisis data juga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang logis, valid, dan relevan dengan tujuan penelitian. Hasil dari analisis ini kemudian menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi, saran, atau solusi terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dengan demikian, analisis data bukan sekadar tahap teknis, tetapi merupakan bagian krusial dalam menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Berikut ini merupakan beberapa tahapan dalam melakukan pengolahan dan juga analisa data, diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Pada tahapan ini, peneliti akan mulai melakukan pengumpulan data-data yang relevan terkait dengan penelitian yang dilakukannya. Pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dalam menentukan

keberhasilan penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data bisa dilakukan dengan studi kepustakaan, wawancara serta melakukan observasi dengan pengamatan langsung di lapangan. Nantinya, setelah data-data terkumpul akan disajikan dalam bentuk transkrip wawancara, deskripsi dokumentasi, dan deskripsi hasil penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan analisis yang memerlukan sensitivitas intelektual, fleksibilitas berpikir, dan pemahaman yang mendalam terhadap konteks data yang dikaji. Tahapan ini dilakukan setelah peneliti memperoleh berbagai data dan informasi yang didapatkannya dari berbagai sumber. Reduksi data adalah tahapan dimana peneliti akan melakukan penyeleksian data, simplifikasi data, agregasi data, pengelompokan data berdasarkan atribut tertentu, penyederhanaan data, pemilihan fitur hingga dengan terakhir penghapusan data tidak valid. Dengan mengurangi data maka menjadikan peneliti dapat lebih fokus kepada aspek-aspek penting dan menjadikan proses analisis menjadi lebih efisien. Akan tetapi, dalam hal ini kegiatan reduksi data harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menghilangkan informasi penting atau mengarah pada kesimpulan yang keliru.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan dimana peneliti mulai menampilkan informasi yang telah diolah dari data dalam bentuk yang mudah untuk dimengerti, jelas dan informative. Secara umum, penyajian data bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Tujuan dari penyajian data ialah untuk menyampaikan temuan, pola, dan informasi penting kepada pemangku kepentingan atau audiens dengan cara yang efektif. Penyajian data yang baik akan sangat membantu dalam menceritakan cerita secara jelas dari data yang telah dianalisis.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan rangkuman atau kesimpulan berdasarkan atas hasil analisis data yang telah dilakukan.

Dengan kata lain, penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari teknik pengolahan data. Penarikan kesimpulan ini berkaitan dengan evaluasi terhadap keseluruhan informasi yang telah diolah untuk mengidentifikasi adanya pola, hubungan atau temuan penting lainnya yang muncul. Jika ditemukan adanya temuan awal dalam rangkaian analisis data maka temuan tersebut masih bersifat sementara yang artinya kevalidan nya masih diragukan. Akan tetapi, jika yang terjadi adalah pada data kesimpulan ditemukan dan terdapat bukti yang konsisten di seluruh studi dan studi berulang maka kesimpulan tersebut dapat dikatakan valid dan kredibel.

3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan oleh penulis di Organisasi Dewan Perwakilan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPC IWAPI) Kabupaten Bogor di Gedung Graha Kadin Jalan Tegar Beriman Lantai 2, Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16915, Indonesia. Sementara itu, penelitian ini akan berlangsung mulai dari bulan April hingga dengan Agustus 2025 mendatang. Berikut adalah tabel rencana jadwal penelitian penulis:

Tabel. 3.2 Jadwal Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Waktu penelitian				
		April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Tahap Penyusunan Proposal					
	Tahap Pengajuan Judul					
	Tahap Revisi Proposal					
	Seminar Proposal					
2.	Tahap Pengurusan Izin Penelitian					
	Pembuatan Pedoman Wawancara					

	Tahap Pengumpulan Data					
3.	Tahap Analisis Data					
	Tahap Penyusunan Skripsi					
	Sidang Skripsi					



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi dan Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Bogor

Kabupaten Bogor atau dahulu dikenal dengan nama *Regentschap Buitenzorg* merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan ibu kota terletak di Cibinong. Kabupaten ini memiliki lokasi yang strategis karena berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi. Sebelah Utara dari Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Sebelah Timur dari Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Karawang. Sebelah Selatan dari Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Dan sebelah Barat dari Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Gambar. 4.1 Peta Kabupaten Bogor



Sumber : Peta Tematik Indonesia

Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah mencapai $\pm 2.966,8 \text{ km}^2$ dan terdiri atas 40 kecamatan, yang mencakup 416 desa dan 19 kelurahan.

Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Kabupaten Bogor telah melampaui angka 5 juta jiwa, menjadikannya sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Jawa Barat yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi regional maupun nasional.

Terletak di kawasan penyangga Ibu Kota Negara dan dikelilingi oleh berbagai kota besar seperti Jakarta, Depok, Bekasi, dan Tangerang, Kabupaten Bogor kerap disebut sebagai pintu gerbang ekonomi kawasan Jabodetabek. Hal ini menempatkan Kabupaten Bogor dalam posisi yang sangat penting sebagai penyangga aktivitas ekonomi perkotaan, terutama dalam hal penyediaan barang dan jasa melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sektor UMKM di Kabupaten Bogor tumbuh pesat dan berperan besar dalam menggerakkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM di wilayah ini mencakup berbagai sektor seperti kuliner, kerajinan tangan, fashion, pertanian, hingga jasa berbasis digital. Salah satu aspek yang menonjol dalam dinamika UMKM Kabupaten Bogor adalah tingginya partisipasi perempuan sebagai pelaku usaha.

UMKM yang dimiliki dan dikelola oleh perempuan tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, tetapi juga menunjukkan kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi berbasis gender. Melalui dukungan dari berbagai pihak, seperti Dinas Koperasi dan UMKM serta organisasi perempuan seperti DPC IWAPI Kabupaten Bogor, perempuan pelaku UMKM mendapatkan akses pelatihan, pembinaan, digitalisasi usaha, hingga peluang pemasaran yang lebih luas.

Namun demikian, penerapan digitalisasi dalam kegiatan usaha, khususnya bagi perempuan pelaku UMKM, masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian pelaku usaha mengalami hambatan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan akses terhadap teknologi, serta minimnya motivasi atau kesadaran akan pentingnya transformasi digital dalam pengembangan usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi pemanfaatan teknologi dan realitas yang dihadapi di lapangan.

Tantangan tersebut memunculkan urgensi untuk mengevaluasi peran organisasi perempuan, khususnya Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau DPC IWAPI Kabupaten Bogor, dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing perempuan pelaku UMKM di era digitalisasi. Evaluasi ini penting untuk menilai sejauh mana organisasi perempuan mampu mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan di lingkungan UMKM Kabupaten Bogor.

Kabupaten Bogor dipilih sebagai lokasi penelitian karena karakteristiknya wilayah yang strategis, jumlah UMKM yang tinggi, serta tingkat partisipasi perempuan dalam sektor usaha mikro yang signifikan. Kehadiran organisasi perempuan seperti DPC IWAPI yang aktif dalam mendorong digitalisasi UMKM menjadikan wilayah ini relevan untuk dianalisis dalam konteks pemberdayaan perempuan di era transformasi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran organisasi perempuan, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau DPC IWAPI Kabupaten Bogor, dapat memberdayakan perempuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM di era digitalisasi. Fokus analisis diarahkan pada bentuk-bentuk peran yang dijalankan oleh organisasi tersebut, strategi yang digunakan dalam mendorong transformasi digital, serta sejauh mana efektivitas peran tersebut dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing perempuan pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bogor.

Sebagai bagian dari penelitian ini, akan disusun pula rekomendasi yang bersifat konstruktif terkait peningkatan peran organisasi perempuan, khususnya Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPC IWAPI) Kabupaten Bogor, dalam pemberdayaan perempuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM di era digitalisasi. Rekomendasi ini dirancang berdasarkan temuan-temuan empiris di lapangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan aktual pelaku UMKM, efektivitas pelaksanaan program, serta berbagai tantangan struktural dan teknis yang dihadapi dalam proses transformasi digital.

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna serta bermanfaat bagi DPC IWAPI Kabupaten Bogor dalam

mengevaluasi dan meningkatkan perannya dalam pemberdayaan perempuan pelaku UMKM di era digitalisasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku UMKM perempuan akan pentingnya transformasi digital, serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan mitra strategis dalam merancang program pemberdayaan yang lebih adaptif dan inklusif. Selain itu, penelitian ini turut memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik di bidang pemberdayaan perempuan, UMKM, dan digitalisasi.

4.1.2 Gambaran Umum Dewan Perwakilan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPC IWAPI) Kabupaten Bogor

Organisasi merupakan suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu (Hasibuan, 2011). Sederhananya, organisasi dikatakan sebagai suatu wadah atau sarana yang terdiri atas beberapa orang yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi. Organisasi juga diartikan sebagai pengaturan kelompok orang yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini organisasi memiliki tiga unsur yaitu struktur yang terdiri dari orang-orang yang memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dan struktur yang mengatur hak dan kewajiban anggotanya dalam melaksanakan tugas organisasi. Sehingga, organisasi itu jelas bahwa suatu organisasi harus memiliki tujuan yang dapat menguntungkan anggotanya (Robbins, 2010).

Pada dasarnya, organisasi dapat didirikan oleh siapa pun, termasuk oleh perempuan, sebagai wujud partisipasi aktif dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya sektor ekonomi. Salah satu organisasi yang merepresentasikan kiprah perempuan dalam dunia usaha di Indonesia adalah IWAPI. IWAPI merupakan organisasi independen yang menghimpun perempuan pelaku usaha dari berbagai sektor, mencakup usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Gambar. 4.2. Logo IWAPI



Sumber: Dewan Pengurus Pusat (DPP) IWAPI Pusat

Sebagai organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi perempuan, IWAPI hadir tidak hanya sebagai wadah kolaborasi antar pelaku usaha perempuan, tetapi juga sebagai sarana advokasi dan penguatan kapasitas dalam bidang kewirausahaan. Keberadaan IWAPI menunjukkan kontribusi nyata perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional serta menjadi bukti bahwa perempuan memiliki potensi strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha. Dengan prinsip "dari perempuan, oleh perempuan, dan untuk perempuan", IWAPI merepresentasikan model organisasi yang berlandaskan solidaritas gender dan semangat kemandirian.

Kehadiran Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) merupakan wujud konkret dari upaya penguatan posisi perempuan dalam sektor ekonomi, khususnya di bidang kewirausahaan. IWAPI didirikan pada tahun 1975 oleh dua bersaudara, yaitu Prof. Kemala Motik dan Dr. Dewi Motik P., M.Si., yang merupakan pengusaha terkemuka asal Palembang, Sumatera Selatan. Pendirian organisasi ini dilandasi oleh keinginan kuat kedua tokoh tersebut untuk membuktikan bahwa perempuan dapat memainkan peran penting dalam membantu perekonomian keluarga. Mereka memulai dari usaha kecil dan lokal hingga berkembang menjadi entitas bisnis yang besar serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Tidak berhenti sampai di situ, keduanya juga menggagas pembentukan asosiasi pengusaha perempuan serta lembaga pendanaan yang dapat membantu para pelaku usaha

perempuan dalam membiayai bisnis mereka. Pendirian organisasi ini juga didasari oleh nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila.

IWAPI sendiri didirikan dengan tujuan utama untuk melakukan pemberdayaan perempuan dalam bidang kewirausahaan, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas anggotanya, serta memperjuangkan kepentingan pengusaha perempuan baik di tingkat nasional maupun internasional. Adapun tujuan lain dari pendirian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Membantu perempuan Indonesia menjadi pengusaha yang tangguh melalui pemberian informasi, advokasi, pendidikan dan pelatihan, serta akses ke lembaga keuangan.
- b. Membina, mengembangkan, dan mempromosikan kerja sama bisnis antaranggota serta memperluas jaringan dengan pengusaha di tingkat global.
- c. Menjadi agen perubahan bagi diri sendiri agar dapat tumbuh menjadi pengusaha yang andal.
- d. Meningkatkan kerja sama yang lebih baik dengan sektor swasta, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat.
- e. Meningkatkan dan mempertahankan citra perempuan pengusaha yang selaras dengan kepribadian dan budaya Indonesia.

Melalui pendekatan berbasis solidaritas gender, organisasi ini turut mendorong lahirnya semangat kewirausahaan di kalangan perempuan, sembari tetap memperhatikan peran domestik dan tanggung jawab keluarga yang secara kultural masih melekat pada perempuan Indonesia. Dengan demikian, IWAPI tidak hanya berperan sebagai wadah profesional bagi pengusaha perempuan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berupaya menciptakan keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan peran gender dalam kehidupan sehari-hari.

Visi yang dimiliki IWAPI ialah untuk menjadi sebuah organisasi perempuan pengusaha Indonesia yang kuat di tingkat nasional dan internasional. Adapun misi yang dimiliki juga sangatlah mulia, diantaranya ialah:

- a. IWAPI memberdayakan dan memperkuat perempuan didalam kegiatan usaha dengan meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola usahanya antara lain: mendapatkan akses terhadap teknologi baru,

informasi tentang pemasaran dan pembiayaan..

- b. IWAPI mengkampanyekan anggotanya dengan berbagai cara, seperti memberikan advokasi, pelatihan (keterampilan teknis, manajemen, sumber daya manusia) dan *networking*.

Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI merupakan suatu organisasi perempuan yang berfokus pada peningkatan kapasitas perempuan melalui kewirausahaan. Menarik waktu kebelakang, Indonesia selalu memiliki permasalahan terhadap tuntutan kesetaraan gender antara perempuan dengan laki-laki dalam setiap lini pekerjaan. Keberadaan IWAPI selain untuk mendorong kapasitas perempuan juga sebagai upaya dalam memperkenalkan kesetaraan gender bahwasannya perempuan mampu untuk masuk kedalam dunia pekerjaan yangmana selama ini selalu di dominasi oleh laki-laki. Dengan kata lain, hanya laki-laki yang bisa untuk melakukan kegiatan berbisnis, sehingga kita sering mendengar kata businessman dalam bahasa inggris (IWAPI, 2015).

Dalam struktur organisasinya, IWAPI terbagi kedalam tiga tingkat kepengurusan, yaitu Dewan Pimpinan Pusat atau DPP, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC. Dewan Pimpinan Pusat atau DPP merupakan kepengurusan tertinggi yang berperan dalam menetapkan arah kebijakan organisasi secara nasional, merumuskan program strategis, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat pusat. Dewan Pimpinan Daerah atau DPD merupakan penghubung antara DPP dan DPC di tingkat provinsi. DPD bertugas untuk mengoordinasikan kegiatan IWAPI di wilayahnya, menyinergikan program pusat dengan pelaksanaan di daerah, serta membina DPC yang berada dalam lingkup provinsinya. Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC merupakan kepengurusan di tingkat kabupaten atau kota yang berperan langsung dalam menjalankan program-program pemberdayaan di lapangan. DPC menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan yang menyentuh langsung anggota dan pelaku UMKM perempuan, serta berinteraksi aktif dengan masyarakat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan atas Surat Keputusan Nomor 022/DPD-IWAPIJABAR/XI/2022 Tentang Susunan Pengurus maka berikut ini merupakan susunan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang IWAPI

Kabupaten Bogor Periode Tahun 2021 – 2026, yaitu:

Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Bogor

Ketua Umum : **Hj. Inne Roswianita, S.E**

1. Wakil Ketua Umum I Bidang Organisasi, Keanggotaan, Kesekretariatan & Hukum : **Hj. Netty Sulastri**

- Ketua Komite (Komtap) Organisasi, Keanggotaan, & Kesekretariatan : Rita Herlina. S.E

Anggota : 1. Ajeng Umaroh
2. Salsabila

- Ketua Komite (Komtap) Hukum : Dewi Neni, S.H

Anggota : 1. Neneng Siti Rachma
2. Siti Nida Nasiba, S.H, M.Kn

2. Wakil Ketua Umum II Bidang Kebendaharaan : **Hj. Masitoh Anwar**

- Ketua Komite (Komtap) Kebendaharaan : 1. Suyatmi Nursalam
2. R. Indriati
3. Susi Christin

3. Wakil Ketua Umum III Bidang UKM, Perindustrian & Perdagangan : **Emma Marlina Alin**

- Ketua Komite (Komtap) UKM : Hj. Desak Ketut Suratning
- Anggota : Febi Eka S
- Ketua Komite (Komtap) Perdagangan & Perindustrian : Siti Rohimah

4. Wakil Ketua Umum IV Bidang Pariwisata Budaya & Ekonomi Kreatif : **Hj. Yanti Mulyanti**

- Ketua Komite (Komtap) Pariwisata : Roeslah Taurina, S.E
- Anggota : Endah Sri Nuraeni, S.E

- Ketua Komite (Komtap) Ekonomi : Lina Kurnaesih
Kreatif
Anggota : Atika Shahab
- 5. **Wakil Ketua Umum V Bidang Humas, Hubungan daerah & Kemitraan** : **Hj. Nueke Nurhasanah**
 - Ketua Komite (Komtap) Bidang Humas : Dra. Herlina Johan
& Hubungan daerah
Anggota : Lilis Lisnawati
 - Ketua Komite (Komtap) Kemitraan : Echi Sucimah
Junaedi
- 6. **Wakil Ketua Umum VI Bidang Sumber Daya Alam & Lingkungan** : **Hj. Tetty Mulyowati**
 - Ketua Komite (Komtap) SDA & Lingkungan Hidup : Nani Suarni, S.Sos
Anggota : 1. Een Nuraeni
2. Nenden S
- 7. **Wakil Ketua Umum VII Bidang Pendidikan & Pelatihan** : **Anisah**
 - Ketua Komite (Komtap) Pendidikan & Pelatihan : Shasa Saijah
Sambyah, S.E, M.M
Anggota : 1. Wiwi
Yulianingsih, S.E, M.M
2. Dedeh Kurnengsih
- 8. **Wakil Ketua Umum VIII Bidang Infrastruktur** : **Siti Aisyah**
 - Ketua Komite (Komtap) Infrastruktur : Tuti Sriwati
Anggota : 1. Siska Harkenas
2. Lusiana Berlianti
- 9. **Wakil Ketua Umum VIII Bidang CSR & Sosial** : **Rita Wahyuni, S.Ikom**

- Ketua Komite (Komtap) CSR & Sosial : Dr. Lugina Jatianita
MARS, FIHFAA
- Anggota : 1. Cucu Musyarofah
2. Silvia Yuniawati

Terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat ketika menjadi anggota IWAPI, di antaranya:

- a. Setiap anggota akan mendapatkan pelatihan terkait pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
- b. Setiap anggota akan diberikan akses untuk menjalin kerja sama dengan perbankan dan koperasi.
- c. Setiap anggota akan diberikan perlindungan usaha.
- d. Setiap anggota akan secara berkala menerima informasi bisnis, seperti info pasar, harga, pameran, dan lainnya.
- e. Setiap anggota akan mendapatkan informasi mengenai peluang usaha baru yang sesuai dengan bidangnya.
- f. Setiap anggota akan difasilitasi layanan promosi usaha melalui internet
- g. Layanan tambahan lainnya akan diupayakan untuk mendukung kemajuan usaha bersama.

Seiring dengan berbagai penawaran yang diberikan oleh IWAPI, terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi oleh masyarakat yang ingin bergabung sebagai anggota. Adapun persyaratan untuk menjadi anggota IWAPI adalah sebagai berikut:

- a. Akte Pendirian Perusahaan (Jika ada)
- b. Memiliki izin usaha
- c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- d. Pas Foto 2 x 3 sebanyak 2 lembar dan 3 x 4 sebanyak 3 lembar
- e. Uang Pangkal sebesar Rp. 250.000,- untuk 1 tahun keanggotaan.

4.1.3 Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPC IWAPI) Kabupaten Bogor

Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau DPC IWAPI merupakan salah satu bagian dari organisasi IWAPI yang DPC menjalankan dan melaksanakan tugas organisasi di tingkat cabang dengan

berkoordinasi secara aktif bersama DPD atau Dewan Pimpinan Daerah IWAPI serta pihak-pihak terkait guna memastikan pelaksanaan program kerja organisasi secara efektif di wilayahnya.

Di tingkat Kabupaten atau Kota, DPC IWAPI ini memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan dan memberdayakan pengusaha wanita serta melakukan komunikasi dan advokasi dengan pemerintah. DPC IWAPI berfungsi juga sebagai wadah konsultasi dan dukungan bagi anggotanya dalam mengembangkan usaha. Adapun tugas DPC IWAPI antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Pembinaan dan Pemberdayaan. Artinya DPC IWAPI memiliki tugas untuk membina dan memberdayakan perempuan pelaku usaha, khususnya anggota IWAPI di wilayahnya. Hal ini dilakukan melalui berbagai program pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses terhadap sumber daya usaha guna membantu mereka mengembangkan bisnis dan meningkatkan keterampilan kewirausahaan.
- b. Melaksanakan Advokasi dan Konsultasi. Artinya, DPC IWAPI berfungsi sebagai wadah konsultasi dan advokasi bagi anggotanya. Fungsi ini mencakup penyampaian aspirasi, perlindungan kepentingan usaha anggota, serta menjadi perantara komunikasi antara perempuan pengusaha dengan pemerintah, lembaga swasta, maupun mitra strategis lainnya guna menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berpihak pada pelaku UMKM perempuan.
- c. Pengembangan Jaringan. Artinya DPC IWAPI memiliki peran dalam membangun dan memperluas jejaring usaha di antara anggotanya. Peranan ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi, saling mendukung antar pelaku usaha perempuan, serta berbagi informasi strategis mengenai peluang bisnis, pemasaran, dan kerja sama dengan mitra potensial baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
- d. Peningkatan Kapasitas. Artinya, DPC IWAPI bertugas untuk menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan kegiatan pemberdayaan guna meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola dan mengembangkan usaha. Kegiatan ini mencakup pelatihan manajerial, literasi keuangan, pemanfaatan teknologi digital,

serta akses terhadap informasi pasar dan jejaring bisnis yang relevan.

Selain menjalankan sejumlah tugas yang telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan DPC IWAPI juga memiliki beberapa fungsi strategis guna mendukung pemberdayaan perempuan pelaku usaha, antara lain sebagai berikut:

- a. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi. Artinya, DPC IWAPI berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal melalui pemberdayaan perempuan pelaku usaha. Melalui berbagai program kewirausahaan, pelatihan, dan fasilitasi akses usaha, DPC IWAPI berkontribusi dalam memperkuat sektor UMKM serta meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan di daerah.
- b. Meningkatkan Kesejahteraan. Artinya, DPC IWAPI memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan perempuan pengusaha. Dengan mendukung penguatan usaha dan kemandirian ekonomi anggotanya, DPC IWAPI secara tidak langsung turut berkontribusi pada peningkatan taraf hidup keluarga dan masyarakat di sekitarnya.
- c. Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi. Artinya, DPC IWAPI berupaya membangun kedaulatan ekonomi rakyat, khususnya di kalangan perempuan, melalui pelaksanaan program-program yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat peran perempuan dalam struktur ekonomi lokal.

4.2 Analisis Peran DPC IWAPI dalam Pemberdayaan Perempuan Pelaku UMKM

Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan rumusan masalah penelitian sebagaimana tercantum dalam BAB I, dimana dalam menjawab atau mengeksplorasi pertanyaan tersebut, penulis menggunakan teori David Lewis dan Nazneen Kanji sebagaimana secara detail dijelaskan pada BAB II dalam penelitian ini. Adapun dimensi peran organisasi terdiri dari 3 (tiga) yaitu Peran *Service Delivery* atau *Implementers*, Peran Katalis atau *Catalyst*, dan Peran Mitra Kerja atau *Partnerships*. Oleh karena itu, untuk membahas pertanyaan dari rumusan masalah dapat dikaitkan dengan dimensi yang ada, maka penulis sampaikan pada bab 4.2.1 yang membahas mengenai masing-masing dimensi yang penulis lakukan dalam

tahapan wawancara yang dilakukan di Kantor DPC IWAPI Kabupaten Bogor.

Pada wawancara ini, penulis melakukan observasi dengan 4 informan yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Umum DPC IWAPI Kabupaten Bogor, 2 (dua) WKU DPC IWAPI Kabupaten Bogor dan 1 (satu) anggota IWAPI sebagai pelaku UMKM.

4.2.1 Peran *Service Delivery* atau *Implementers*

Pada dimensi pertama ini penulis menggunakan dimensi *service delivery* atau *implementers*. Dimensi ini berkaitan dengan kemampuan NGO yaitu DPC IWAPI Kabupaten Bogor dalam memobilisasi berbagai sumber daya untuk memberikan pelayanan langsung kepada pelaku UMKM perempuan. Peran ini diwujudkan melalui penyediaan program nyata yang dapat diakses oleh anggota, khususnya dalam hal peningkatan keterampilan, akses pengetahuan, serta dukungan praktis yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Dalam hal ini pun, penulis melakukan wawancara untuk dapat mengetahui peranan DPC IWAPI Kabupaten Bogor sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan pelatihan bagi pelaku UMKM. Untuk dapat informasi lebih jelas, maka penulis mengkonfirmasi kepada Ibu Inne Roswianita selaku Ketua Umum DPC IWAPI Kabupaten Bogor Beliau mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya, IWAPI atau Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia merupakan sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya dalam mendukung para wanita yang menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam penyelenggaraannya, kami memfasilitasi mereka secara konsisten dengan memberikan edukasi melalui penyelenggaraan pelatihan seperti *digital marketing*, *workshop E-commerce*, hingga dengan literasi keuangan digital seperti penggunaan QRIS hingga dengan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan digital. Selain itu, pelatihan public speaking juga diberikan dengan tujuan membekali mereka keterampilan komunikasi yang baik, khususnya saat berinteraksi dengan pihak perbankan maupun lembaga keuangan lainnya ataupun kepada konsumen. Tentunya

setiap penyelenggaraan pelatihan selalu disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap anggota. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwasannya kami ini merupakan organisasi nirlaba maka sudah pasti kadangkala kami kesulitan dalam masalah anggaran namun hal ini selalu bisa kami selesaikan dengan melaksanakan kegiatan pelatihan melalui cara kolaborasi dengan pemerintah daerah atau pihak luar. Kolaborasi ini dilakukan guna memperkuat kapasitas organisasi, memperluas jangkauan program, serta memastikan keberlanjutan kegiatan yang dijalankan. Melalui kerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, atau anggota agar dapat mengakses dukungan finansial, teknis, maupun jaringan yang lebih luas untuk mendukung pencapaian tujuan sosial yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan atas informasi diatas, dapat kita ketahui bahwa dari dimensi *implementers*, DPC IWAPI Kabupaten Bogor menunjukkan peran strategisnya dalam menggerakkan dan melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan pelaku UMKM. Sebagai organisasi nirlaba yang bergerak di bidang kewirausahaan dan pemberdayaan perempuan, DPC IWAPI secara aktif menjalankan berbagai kegiatan edukatif seperti *digital marketing*, *workshop E-commerce*, hingga dengan literasi keuangan digital seperti penggunaan QRIS hingga dengan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan digital. Selain itu, pelatihan public speaking juga diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bernegosiasi, kepercayaan diri, memperkuat branding dan promosi produk, memperluas jaringan bisnis hingga dengan meningkatkan profesionalisme dan kredibel di mata mitra maupun konsumen.

Penyelenggaraan pelatihan ini dapat dipahami sebagai respons strategis terhadap aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan oleh para anggota, sehingga program yang dilaksanakan benar-benar relevan dengan permasalahan yang mereka hadapi. Hal ini mencerminkan pendekatan partisipatif yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan nyata di lapangan.

Kendati memiliki keterbatasan dari sisi pendanaan, DPC IWAPI tetap mampu menjalankan program-programnya melalui upaya kolaboratif dengan

berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, maupun mitra eksternal lainnya. Kolaborasi ini bukan hanya menjadi solusi atas keterbatasan sumber daya, tetapi juga menjadi strategi untuk memperluas cakupan program, memperkuat kapasitas organisasi, dan memastikan keberlanjutan kegiatan. Dengan demikian, DPC IWAPI tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pelaksana aktif yang mampu merespons isu sosial dan kebutuhan ekonomi anggotanya secara konkret dan terstruktur.

Bu inne juga melanjutkan penjelasannya yang menyatakan bahwa:

“Kami akan terus mendorong anggota untuk dapat berkembang lebih baik dan lebih besar namun dengan catatan mereka memiliki niat dan semangat untuk maju kedepan. Berbicara mengenai digitalisasi, jauh sebelum teknologi berkembang dengan cepat dan belum banyak pihak yang melihat pentingnya pelatihan digitalisasi, kami sudah melihat ada peluang yang sangat besar ini. sejak awal masa kepemimpinan saya, saya sudah memiliki inisiatif untuk mengusulkan kepada DPP Pusat agar membuat program pemberdayaan atau pelatihan yang dapat menunjang kemampuan anggota dalam menghadapi era digital. Usulan tersebut kemudian direalisasikan, dan DPC IWAPI Kabupaten Bogor menjadi yang pertama menjalankannya.”

Berdasarkan pernyataan informan di atas, terlihat bahwa DPC IWAPI Kabupaten Bogor menunjukkan adanya inisiatif yang progresif dalam merespons dinamika perubahan, khususnya terkait dengan perkembangan digitalisasi. Bahkan sebelum isu digitalisasi menjadi perhatian luas, DPC IWAPI telah memiliki kesadaran awal terhadap pentingnya membekali anggota dengan keterampilan digital sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan zaman. Inisiatif ini diwujudkan melalui usulan program pelatihan berbasis digital kepada DPP IWAPI Pusat, yang kemudian direalisasikan dan menjadikan DPC IWAPI Kabupaten Bogor sebagai pelaksana pertama program tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa DPC IWAPI tidak hanya menjalankan fungsi pelaksana secara reaktif terhadap kebutuhan saat ini, tetapi juga secara proaktif mengantisipasi tantangan di masa depan. Kemampuan untuk

membaca peluang serta merancang program yang visioner menjadi bagian dari strategi implementatif organisasi dalam memastikan keberlanjutan pemberdayaan perempuan pelaku UMKM di tengah era digital.

Terkait dengan dimensi *Implementers* dalam pemberdayaan pelaku UMKM oleh DPC IWAPI Kabupaten Bogor, lebih lanjut dijelaskan oleh Ibu Netty sebagai Wakil Ketua Umum Bidang I Organisasi, Keanggotaan & Kesekretariatan sekaligus juga Anggota IWAPI. Beliau mengatakan bahwa:

“Saat ini kami telah melaksanakan banyak pelatihan, salah satunya yang berkaitan dengan digitalisasi. Ini merupakan salah satu inisiasi dari ibu ketua serta juga menjadi solusi bagi setiap anggota. Karena memang banyak diantara pelatihan yang kami selenggarakan itu berbasis pada apa yang menjadi kebutuhan dari setiap anggota. Misalnya, kami melihat ternyata banyak diantara anggota IWAPI yang kemampuan untuk melakukan kegiatan komunikasi itu masih rendah. Sehingga, kami merancang pelatihan *public speaking* dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah waktu itu”

Hal senada juga diungkapkan oleh diungkapkan juga oleh salah satu anggota pengurus DPC IWAPI Kabupaten Bogor, yaitu Ibu Rita selaku Wakil Ketua Umum Bidang IX CSR & Sosial dan sekaligus juga Anggota IWAPI. Beliau mengatakan bahwa:

“Kalau berbicara mengenai program atau kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan digitalisasi, DPC IWAPI Kab. Bogor banyak sekali menyelenggarakan kegiatan untuk setiap anggota. Seperti kemarin pernah kita mengadakan pelatihan mengenai *digital marketing* dan *public speaking*. Menurut pandangan saya juga, kegiatan pelatihan *public speaking* itu memang sangatlah penting ya bagi pelaku UMKM. Karena saya melihat kadangkala banyak sekali anggota yang masih belum memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang baik dan benar. Sementara itu, dilihat dari segi pelaksanaan atau penyelenggaraannya, program-program tersebut telah terlaksana dengan baik oleh IWAPI. Meskipun memang organisasi ini kadangkala terkendala dalam

mendatangkan pembicara karna membutuhkan adanya anggaran atau biaya. Akan tetapi, kami berusaha untuk memaksimalkan segala bentuk potensi yang ada.”

Kemudian salah satu Anggota IWAPI Pelaku UMKM selaku anggota yang merasakan pelatihan yaitu Ibu Novi. Beliau mengatakan bahwa:

“Pelatihan yang diselenggarakan IWAPI itu sangat membantu saya dalam pengembangan usaha. Karena tidak bisa dipungkiri memang saat ini mau tidak mau kita harus membuka mata terhadap teknologi. Dan terkadang hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan itu penting ternyata sangat penting untuk kemudahan saya dalam beruwirusaha. Jadi secara tidak langsung, dengan adanya pelatihan yang diberikan bisa menambah pengetahuan saya. Karna menurut saya, setiap kali IWAPI mengadakan pelatihan itu narasumber yang didatangkan memang berkompeten di bidangnya. Ditambah lagi, kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh IWAPI tidak hanya berfokus pada pelatihan yang meningkatkan kemampuan saja melainkan seringkali ada kegiatan *sharing* yang memberikan kami pengetahuan dan pandangan baru. Namun, seringkali dalam penyelenggaraannya saya tidak bisa banyak mengikuti karna keterbatasan waktu yang saya miliki.”

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, dapat diketahui bahwa pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan DPC IWAPI lahir dari pemetaan kebutuhan di lapangan. Misalnya, ketika diketahui bahwa kemampuan komunikasi sebagian anggota masih rendah, DPC IWAPI merespons dengan menyelenggarakan pelatihan *public speaking*, bahkan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan kegiatan tersebut. Dan untuk meningkatkan strategi promosi produk anggota, DPC IWAPI memberikan pelatihan berupa *digital marketing* dimana para anggota dapat meningkatkan promosi mereka melalui media sosial atau membuat konten yang kreatif. Hal ini bertujuan untuk membantu anggota dalam memperluas pasar nya secara online dan meningkatkan daya tarik produk.

Berdasarkan hasil eksplorasi penulis, dapat disimpulkan bahwa peran

DPC IWAPI dalam dimensi *service delivery* atau *implementers* terkait dengan pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Bogor telah berjalan secara aktif, strategis, adaptif dan baik. Hal ini tercermin melalui pengadaan berbagai pelatihan yang disusun berdasarkan kebutuhan riil anggota, seperti pelatihan terkait dengan *digital marketing*, *workshop E-commerce*, literasi keuangan digital hingga dengan *public speaking*. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi bukti konkret bahwa DPC IWAPI tidak hanya merancang program secara top-down, melainkan juga melibatkan partisipasi dan masukan dari anggota dalam penentuan materi pelatihan.

Pelaksanaan program juga menunjukkan adanya inisiatif progresif, terutama dalam merespons dinamika digitalisasi. Hal ini tercermin dari langkah awal DPC IWAPI Kabupaten Bogor yang menjadi pelaksana pertama program pelatihan berbasis digital setelah mengusulkan inisiatif tersebut ke DPP IWAPI Pusat. Langkah tersebut menandakan bahwa organisasi tidak hanya reaktif terhadap perubahan, tetapi juga mampu bersikap proaktif dan visioner dalam menyusun strategi pemberdayaan.

Meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya, terutama dalam aspek pendanaan dan ketersediaan narasumber, Sebagai organisasi nirlaba, DPC IWAPI tetap mampu mengatasi keterbatasan sumber daya melalui strategi kolaboratif, seperti menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah atau pihak eksternal lainnya. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat kapasitas internal organisasi, tetapi juga memperluas jangkauan dan dampak program yang dijalankan.

Dari perspektif anggota, terlihat juga pelatihan yang diselenggarakan dirasakan memberikan dampak yang positif, terutama dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta kesiapan mereka dalam menghadapi tantangan usaha di era digital. Namun demikian, masih ditemukan kendala dalam partisipasi penuh anggota, salah satunya karena keterbatasan waktu. Hal ini menjadi catatan penting bagi organisasi untuk menyusun strategi pelaksanaan yang lebih fleksibel dan inklusif ke depannya.

Dengan demikian, DPC IWAPI Kabupaten Bogor telah menjalankan peran *Implementers* secara efektif dan kontekstual, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program pemberdayaan. Peran ini tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi juga mencerminkan

komitmen organisasi dalam membangun kapasitas anggota secara berkelanjutan, terutama di tengah tantangan dan peluang digitalisasi.

4.2.2 Peran Katalis atau *Catalyst*

Peran Katalis atau *Catalyst* dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana DPC IWAPI Kabupaten Bogor dapat berperan sebagai agen perubahan atau *agent of change* yang mampu mendorong lahirnya inovasi, melakukan advokasi kebijakan, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi program yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM perempuan. Peran ini menegaskan bahwa DPC IWAPI tidak hanya sekedar menjalankan fungsi administratif organisasi, melainkan juga menjadi motor penggerak perubahan sosial-ekonomi yang strategis.

Untuk mengetahui lebih jelasnya, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Inne Roswianita Selaku Ketua Umum DPC IWAPI Kabupaten Bogor. Beliau mengatakan bahwa:

“DPC IWAPI merupakan organisasi yang berupaya menjadi wadah sekaligus fasilitator bagi setiap anggotanya untuk terus berkembang, baik secara pribadi maupun dalam menjalankan usahanya. Memang harus diakui bahwa saat ini masih ditemukan sebagian anggota yang belum memahami atau belum mampu menerapkan teknologi digital secara optimal. Namun, kami tidak tinggal diam. Kami siap memberikan pendampingan secara bertahap melalui berbagai pelatihan yang kami selenggarakan. Bagi kami, selama anggota memiliki niat dan kemauan untuk maju, kami akan selalu hadir untuk mendampingi dan memberikan dukungan penuh. Dari berbagai kegiatan pelatihan yang telah kami lakukan, saya pribadi melihat adanya perkembangan positif. Seperti setelah dilaksanakan nya pelatihan terkait dengan digital marketing, saya melihat beberapa anggota mulai langsung mempraktikkanya kedalam kegiatan usahanya seperti memulai kegiatan promosi melalui media sosial atau menerapkan penggunaan keuangan digital dalam hal pencatatan atau pembayaran. Namun, memang terdapat juga sebagian anggota yang masih sekedar mengikuti pelatihan sebagai

formalitas, tanpa langsung mengaplikasikannya dalam bisnis mereka. Ini tentu menjadi catatan bagi kami untuk terus melakukan evaluasi dan pendekatan yang lebih efektif agar pelatihan yang kami berikan benar-benar memberikan dampak nyata.”

Berdasarkan atas penjelasan informan di atas, dapat dilihat bahwa organisasi ini menunjukkan adanya komitmen kuat dalam mendukung proses pemberdayaan anggotanya, khususnya pelaku UMKM perempuan, agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era digitalisasi. IWAPI tidak hanya berperan sebagai fasilitator dalam memberikan pelatihan, tetapi juga berfungsi sebagai pendamping aktif yang siap memberikan dukungan berkelanjutan kepada anggotanya.

Melalui pelatihan literasi digital dan keterampilan aplikatif lainnya, IWAPI berupaya membekali para anggota dengan pengetahuan yang relevan dan dibutuhkan dalam mengelola usaha secara lebih efektif dan efisien. Meski masih terdapat tantangan, seperti belum meratanya pemahaman anggota terhadap teknologi, DPC IWAPI tetap konsisten mengedepankan pendekatan yang partisipatif dan adaptif. Hal ini memperkuat posisi DPC IWAPI sebagai organisasi yang berperan strategis dalam mendorong transformasi digital di kalangan pelaku UMKM, serta menjadi agen perubahan yang mampu menjembatani kebutuhan anggotanya dengan tuntutan zaman.

Untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut, penulis mencoba untuk mewawancarai Ibu Rita sebagai salah satu Wakil Ketua Umum Bidang IX CSR & Sosial dan sekaligus juga anggota IWAPI Kabupaten Bogor. Beliau mengatakan bahwa:

“Dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan, kadangkala kami dihadapi dengan tantangan atau hambatan berupa kecepatan dalam pemahaman literasi digital setiap anggota dan faktor usia. Namun, banyak juga diantara para anggota yang setelah kegiatan dilangsungkan terdapat perubahan dari pola pikir yang diaplikasikan menjadi aksi nyata. Dan jujur ini membuat saya sangat senang. Karna dengan adanya pola pikir yang baru ini memunculkan adanya kemauan serta semangat untuk perubahan

yang lebih baik. Walaupun, ada juga yang telah diberikan pelatihan memang tidak diterapkan dalam kegiatan usahanya.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Netty sebagai Wakil Ketua Umum Bidang I Organisasi, Keanggotaan & Kesekretariatan dan Anggota IWAPI dan sekaligus juga anggota IWAPI. Beliau mengatakan bahwa:

“Iya, kalau berbicara mengenai pelatihan memang ketika pelaksanaan kegiatan tersebut hambatan serta tantangan itu selalu dan hampir ada. Seringkali memang hambatan yang kami temui ialah ketika peserta, khususnya ibu-ibu, mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh narasumber. Kesulitan ini mereka rasa karna mungkin penyampaian materi oleh narasumber yang terlalu cepat atau karena mereka belum terbiasa dengan istilah-istilah yang digunakan, apalagi materi yang dibahas ini berkaitan dengan digitalisasi atau teknologi. Bahkan saya sendiri pun, meskipun sudah beberapa kali mengikuti pelatihan, masih kadang belum sepenuhnya memahami isi materinya. Jadi memang butuh waktu dan pengulangan agar benar-benar bisa dipahami.”

Berdasarkan pernyataan informan tersebut, dapat dilihat bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan pelatihan literasi digital oleh DPC IWAPI Kabupaten Bogor berkaitan dengan perbedaan kemampuan dalam memahami materi digital, serta faktor usia anggota. Perbedaan ini menciptakan adanya dinamika tersendiri dalam proses pemberdayaan, di mana tidak semua peserta mampu menyerap dan menerapkan materi pelatihan secara seragam atau secepat yang diharapkan.

Namun demikian, dampak positif dari pelatihan tetap terlihat, terutama melalui adanya perubahan pola pikir yang ditunjukkan oleh sebagian anggota. Transformasi pola pikir ini merupakan indikator penting dalam proses pemberdayaan, karena menjadi titik awal lahirnya kemauan untuk berubah dan berkembang. Dalam konteks literasi digital, pergeseran pola pikir menuju pemahaman dan keterbukaan terhadap teknologi menjadi landasan bagi munculnya aksi nyata dalam usaha masing-masing anggota.

Meskipun terdapat peserta yang belum mengimplementasikan hasil

pelatihan ke dalam praktik usahanya, hal ini dapat dimaknai sebagai proses bertahap, di mana keberhasilan pemberdayaan tidak selalu langsung terlihat secara fisik, melainkan melalui perubahan cara pandang terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa DPC IWAPI tidak hanya berperan dalam mentransfer pengetahuan teknis, tetapi juga sebagai katalis perubahan sikap dan mentalitas anggotanya dalam menghadapi era digital.

Adanya transformasi pola pikir ini tentunya harus dijaga keberlangsungannya dan sebisa mungkin harus mengalami kenaikan. Karena, merubah pola pikir seseorang khusus nya dalam hal wirausaha itu sangatlah sulit. Membutuhkan waktu yang tidaklah sedikit dan harus dilakukan secara perlahan.

Kemudian salah satu anggota IWAPI selanjutnya, yaitu Ibu Novi. Beliau mengatakan bahwa:

“Awalnya saya merasa sangat tertarik dengan penggunaan teknologi digital ini khususnya di *marketplace* dan setelah pelatihan itu saya praktikan dalam usaha yang saya miliki. Namun seiring berjalannya waktu, saya memilih untuk berhenti menggunakan *marketplace* dalam kegiatan usaha yang saya jalani. Hal ini dikarenakan, saya memiliki ketakutan dalam mendapatkan ulasan atau komentar yang buruk terkait dengan produk yang saya jual di platform *marketplace* saya.”

Berdasarkan pernyataan ini, terlihat adanya perubahan pola pikir yang dapat mendorong pelaku UMKM untuk mencoba mengadopsi platform digital dalam aktivitas usahanya. Pelatihan yang diselenggarakan oleh IWAPI tampaknya berhasil menumbuhkan minat dan memberikan pengetahuan dasar bagi anggota untuk mulai bereksperimen dengan kanal digital sebagai sarana pemasaran dan penjualan.

Namun, dalam praktiknya, tantangan psikologis, sosial dan kadangkala lokasi menjadi hambatan tersendiri dalam keberlanjutan penggunaan teknologi tersebut. Ketakutan akan menerima ulasan negatif atau komentar buruk menunjukkan adanya kerentanan mental dan belum terbentuknya kepercayaan diri yang kuat dalam menghadapi risiko interaksi digital. Hal ini juga mencerminkan bahwa penerapan digitalisasi dalam UMKM tidak hanya

membutuhkan keterampilan teknis, tetapi juga kesiapan mental dan emosional dari pelaku usahanya.

Kondisi ini menyoroti pentingnya pendampingan lanjutan dan pendekatan yang lebih holistik dalam pelatihan digitalisasi, yang tidak hanya fokus pada aspek teknis (seperti cara menggunakan platform), tetapi juga pada penguatan mentalitas kewirausahaan digital, seperti bagaimana menghadapi kritik, mengelola reputasi online, dan membangun kepercayaan diri di ruang digital.

Kemudian Wakil Ketua Umum Bidang IX CSR & Sosial dan sekaligus juga Anggota IWAPI, yaitu Ibu Rita menambahkan pernyataannya. Beliau mengatakan bahwa:

“DPC IWAPI Kab.Bogor ini membawahi beberapa kecamatan kurang lebih sekitar 40 kecamatan yang ada di kabupaten bogor. Sejujurnya untuk menggapai itu semua memang tidaklah mudah. Oleh karena itu, DPC IWAPI membentuk adanya Korwil atau Koordinator Wilayah yang bertugas untuk melakukan pemantauan, pengawasan hingga dengan bertanggung jawab atas wilayah yang dipegangnya. Secara keseluruhan, DPC IWAPI ini total memiliki 6 korwil dan saya adalah salah satu anggota sekaligus ketua korwil 5. Dengan adanya korwil ini tentu membantu IWAPI dalam menjangkau serta memberikan pendampingan untuk setiap anggota nya yang berada di berbagai wilayah dan ini menjadi upaya yang efektif untuk dilakukan. Pemantauan terhadap anggota yang telah diberikan pelatihan ataupun pendampingan akan masuk kedalam laporan pertanggung jawaban yang nantinya akan dilaporkan pada saat rapat yang diselenggarakan setiap sebulan sekali. Hal ini dilakukan agar ibu ketua IWAPI mengetahui bagaimana *progress* dan kebutuhan dari setiap anggotanya.”

Berdasarkan atas pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa Pernyataan tersebut menggarisbawahi mekanisme struktural dan strategi desentralisasi yang diterapkan oleh DPC IWAPI Kabupaten Bogor dalam menjangkau dan memberdayakan anggotanya secara efektif di wilayah yang

luas. Dengan cakupan wilayah kerja yang mencakup kurang lebih 40 kecamatan, tantangan dalam hal aksesibilitas, pemantauan, dan efektivitas pelaksanaan program tentu menjadi hal yang signifikan.

Pembentukan Koordinator Wilayah atau Korwil menjadi solusi yang strategis untuk menghadapi tantangan ini. Melalui sistem korwil, DPC IWAPI Kabupaten Bogor mampu mendistribusikan peran dan tanggung jawab secara lebih merata, sekaligus memastikan bahwa pendampingan, pelatihan, serta pemantauan terhadap anggota dapat dilakukan secara lebih dekat dan intensif. Korwil berperan sebagai perpanjangan tangan organisasi yang tidak hanya bertugas dalam mengawasi pelaksanaan program, tetapi juga dalam menyerap kebutuhan serta perkembangan anggota di wilayah masing-masing.

Pelaporan berkala yang dilakukan setiap bulan mencerminkan adanya sistem monitoring dan evaluasi atau *monev* yang terstruktur dan berkesinambungan. Dengan adanya laporan tersebut, pimpinan DPC IWAPI Kabupaten Bogor dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai progress, tantangan, dan kebutuhan anggota. Hal ini penting dalam pengambilan keputusan organisasi yang berbasis data lapangan serta untuk menyusun kebijakan atau program lanjutan yang lebih relevan dan responsif.

Secara keseluruhan, pendekatan ini memperlihatkan bahwa DPC IWAPI Kabupaten Bogor tidak hanya fokus pada pelatihan semata, tetapi juga menekankan pada pendampingan jangka panjang dan penguatan struktur organisasi. Hal ini memperkuat peran DPC IWAPI Kabupaten Bogor sebagai organisasi yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata anggotanya, terutama dalam konteks pemberdayaan UMKM perempuan di era digital.

Kemudian salah satu Wakil Ketua Umum Bidang I Organisasi, Keanggotaan & Kesekretariatan dan sekaligus juga Anggota IWAPI, yaitu Ibu Netty memberikan pandangannya. Beliau mengatakan bahwa:

“Untuk kegiatan monitoring atau pemantauan terhadap perkembangan para anggota memang kami membaginya ke dalam beberapa korwil. Satu korwil biasanya bertanggung jawab atas beberapa kecamatan, dan di dalam masing-masing kecamatan itu terdapat ranting-ranting juga. Namun, dalam

pelaksanaannya, kadangkala terdapat kendala yang kami hadapi. Salah satunya adalah jarak antarwilayah yang cukup jauh dan sulit dijangkau. Kondisi geografis ini membuat kami kesulitan untuk melakukan pemantauan secara langsung maupun menyelenggarakan pelatihan di daerah tersebut. Akibatnya, memang ada beberapa kecamatan yang cenderung pasif karena keterbatasan akses dan minimnya pendampingan secara rutin.”

Lebih lanjut diungkapkan oleh salah satu anggota IWAPI, yaitu Ibu Novi. Beliau mengatakan bahwa:

“Setelah kegiatan pelatihan memang terdapat pendampingan atau monitoring dari IWAPI. Seringkali kegiatan ini dilakukan secara online. Misalnya, setiap anggota diminta untuk melaporkan perkembangan atau progress mereka melalui grup chat yang sudah dibuat. Jadi dari situ IWAPI bisa melihat sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai oleh anggotanya, dan jika ada kendala, bisa langsung ditindaklanjuti juga lewat forum tersebut.”

Berdasarkan atas pernyataan tersebut, diketahui bahwa DPC IWAPI telah menerapkan sistem organisasi berbasis wilayah melalui pembentukan beberapa koordinator wilayah (korwil) yang membawahi sejumlah kecamatan dan ranting. Strategi ini merupakan bentuk dari desentralisasi peran dan upaya memperluas jangkauan organisasi hingga ke tingkat akar rumput. Dalam kerangka peran katalis, sistem ini menunjukkan komitmen IWAPI dalam menciptakan jaringan kerja yang kuat dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Namun, dalam implementasinya, terdapat kendala yang cukup signifikan, terutama berkaitan dengan faktor geografis. Jarak antarwilayah yang jauh dan sulit dijangkau menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan pelatihan secara langsung. Akibat dari kondisi tersebut adalah berkurangnya intensitas pendampingan, minimnya interaksi langsung dengan anggota, serta tidak meratanya distribusi program pelatihan dan pemberdayaan. Hal ini menyebabkan beberapa kecamatan menjadi pasif dan tidak berkembang secara optimal, terutama dalam menghadapi tantangan

dan peluang digitalisasi.

Disamping itu, terkait dengan advokasi kebijakan, Ibu Inne Roswianita selaku Ketua Umum DPC IWAPI Kabupaten Bogor mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya, organisasi kami tidak bergerak di ranah politik, sehingga tidak secara langsung mendorong adanya advokasi kebijakan kepada pemerintah. Meski demikian, kami tetap berupaya memberikan masukan atau saran yang bersumber dari hasil pengamatan langsung di lapangan serta berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Masukan tersebut biasanya disampaikan ketika terdapat kesempatan kerja sama atau kolaborasi dengan pihak pemerintah, dan bersifat aspiratif serta non-formal, yakni sebatas saran yang ditujukan untuk mendukung efektivitas program yang dijalankan.”

Berdasarkan pada informasi diatas dapat kita ketahui bahwa dalam advokasi kebijakan peran DPC IWAPI bersifat aspiratif dan partisipatif, bukan advokatif dalam arti formal. Organisasi ini tidak secara langsung terlibat dalam proses penyusunan atau penekanan terhadap kebijakan publik, melainkan berkontribusi melalui penyampaian masukan, saran, atau rekomendasi yang bersumber dari hasil temuan di lapangan.

Untuk mengkonfirmasi penulis melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Netty Sulastris selaku Wakil Ketua UMUM I Bidang Organisasi, Keanggotaan & Kesekretariaatan. Beliau mengatakan bahwa:

“Untuk ruang advokasi atau forum diskusi biasanya kami lakukan di kantor dan ketika forum tersebut berlangsung para anggota dipersilahkan untuk melaporkan atau melakukan diskusi secara langsung dengan ibu Ketua.”

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Rita Wahyuni, selaku Ketua Umum IX CSR & Sosial, mengatakan bahwa:

“Divisi hukum adalah bidang yang bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan advokasi kebijakan. Namun, menurut saya, ungsi tersebut hingga saat ini belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penyampaian kebutuhan maupun tantangan yang dihadapi oleh para anggota, khususnya terkait isu digitalisasi,

umumnya dilakukan melalui forum-forum diskusi informal yang diadakan secara rutin dalam kegiatan organisasi.”

Berdasarkan hasil eksplorasi penulis dimensi katalis dalam penyelenggaraan pemberdayaan Pelaku UMKM melalui pelatihan yang dilakukan DPC IWAPI Kabupaten Bogor menunjukkan perannya sebagai agen perubahan atau *agent of change* yang tidak hanya berperan dalam memberikan pelatihan teknis, tetapi juga mendorong transformasi pola pikir anggotanya, khususnya pelaku UMKM perempuan. Peran katalis ini diwujudkan melalui upaya fasilitasi pelatihan, pendampingan, serta motivasi berkelanjutan agar anggota mampu beradaptasi dengan tantangan dan tuntutan di era digital.

DPC IWAPI secara konsisten menyampaikan pesan-pesan penting mengenai pentingnya digitalisasi, terutama dalam pengelolaan dan pemasaran usaha. Dalam hal ini, organisasi tidak hanya bertindak sebagai penyampai materi, melainkan juga berperan dalam membentuk kesadaran baru di kalangan anggota terkait urgensi literasi digital. Hal ini sejalan dengan fungsi katalis yang secara teoritis bertugas mempercepat proses perubahan sosial dan ekonomi di tingkat komunitas.

Meskipun terdapat tantangan internal seperti kesenjangan kemampuan dalam memahami materi digital, faktor usia, dan kecepatan adopsi teknologi, IWAPI telah melakukan pendekatan bertahap dan partisipatif. Beberapa anggota menunjukkan adanya transformasi pola pikir yang kemudian mendorong perubahan tindakan nyata, seperti mulai memanfaatkan media sosial atau platform digital untuk promosi produk dan pencatatan keuangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan DPC IWAPI Kabupaten Bogor tidak hanya berdampak pada aspek pengetahuan, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan kesiapan mental anggota dalam menghadapi perubahan.

Di sisi lain, tantangan eksternal seperti kondisi geografis Kabupaten Bogor yang luas dan sulit dijangkau menjadi kendala dalam pelaksanaan monitoring dan pelatihan secara langsung. Untuk mengatasi hal tersebut, DPC IWAPI Kabupaten Bogor menerapkan strategi desentralisasi organisasi dengan membentuk Koordinator Wilayah atau Korwil dan ranting di setiap

kecamatan. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat jangkauan organisasi, memudahkan pengawasan, dan memastikan pendampingan dilakukan secara lebih dekat dengan anggota.

Selain itu, DPC IWAPI Kabupaten Bogor juga memanfaatkan teknologi digital sebagai media monitoring, seperti penggunaan grup chat untuk pelaporan perkembangan anggota pasca pelatihan. Hal ini menjadi bentuk adaptasi terhadap keterbatasan mobilitas sekaligus mencerminkan upaya DPC IWAPI Kabupaten Bogor dalam menjaga kesinambungan proses pemberdayaan melalui cara yang lebih fleksibel dan kontekstual.

Sementara itu, advokasi kebijakan yang dilakukan oleh DPC IWAPI Kabupaten Bogor juga masih berada pada tahap awal. Fokus utamanya bukan pada pengaruh langsung terhadap regulasi, melainkan pada penyampaian gagasan, aspirasi, dan rekomendasi praktis untuk mendukung pelaksanaan program yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan anggota. Hal ini menunjukkan adanya potensi bagi IWAPI untuk mengembangkan kapasitas advokasinya di masa mendatang agar dapat berperan lebih strategis dalam proses perumusan kebijakan publik, khususnya di bidang pemberdayaan dan digitalisasi UMKM perempuan.

Secara keseluruhan, peran katalis DPC IWAPI Kabupaten Bogor telah dijalankan secara progresif dan relevan dengan kebutuhan zaman. DPC IWAPI Kabupaten Bogor tidak hanya memberikan pelatihan sebagai bentuk transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan pola pikir sebagai fondasi utama dalam proses pemberdayaan. Meskipun masih terdapat hambatan terkait dengan struktural, psikologis dan advokasi kebijakan, strategi yang digunakan DPC IWAPI Kabupaten Bogor menunjukkan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi katalis secara adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan di tengah era digitalisasi tapi evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memaksimalkan peran organisasi.

4.2.3 Peran Mitra Kerja atau *Partnerships*

Peran Mitra Kerja atau *Partnerships* dalam konteks ini merujuk pada sejauh mana DPC IWAPI Kabupaten Bogor berperan sebagai mitra kerja atau *partnerships* dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah hingga dengan sektor swasta, guna memperkuat program-

program pemberdayaan, khususnya dalam bidang digitalisasi UMKM perempuan. Peran ini menunjukkan bahwa DPC IWAPI Kabupaten Bogor tidak hanya berfokus pada upaya internal organisasi, melainkan juga aktif menjalin kolaborasi eksternal untuk memperluas dampak dan jangkauan program, seperti pelatihan digital, literasi keuangan, dan akses permodalan. Bentuk kemitraan ini mencerminkan upaya kolektif dalam menanggung risiko dan tanggung jawab bersama dalam mendukung transformasi digital pelaku UMKM, terutama perempuan.

Peran DPC IWAPI Kabupaten Bogor sebagai mitra kerja atau *partnership* menjadi salah satu dimensi penting yang mencerminkan sejauh mana organisasi ini mampu membangun kolaborasi strategis dengan berbagai pihak. DPC IWAPI Kabupaten Bogor secara aktif menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan program-program pelatihan dan pendampingan. Kemitraan ini dilakukan tidak hanya untuk memperkuat kapasitas internal organisasi, tetapi juga sebagai strategi untuk memperluas akses sumber daya dan memastikan keberlanjutan program pemberdayaan yang dijalankan.

Sebagai organisasi perempuan, DPC IWAPI Kabupaten Bogor memosisikan dirinya sebagai jembatan antara anggotanya, yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM perempuan, dengan ekosistem pendukung yang lebih luas. Fungsi ini berperan penting dalam menghadapi tantangan digitalisasi, di mana kebutuhan terhadap peningkatan literasi digital dan penguasaan teknologi menjadi semakin mendesak. Melalui kolaborasi yang dibangun, DPC IWAPI Kabupaten Bogor tidak hanya mampu menghadirkan pelatihan yang relevan, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem pemberdayaan yang inklusif, responsif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Sehingga, dimensi kemitraan ini tidak hanya menunjukkan fleksibilitas dan keterbukaan organisasi terhadap kerjasama eksternal, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas DPC IWAPI Kabupaten Bogor dalam memenuhi kebutuhan nyata anggotanya, terutama dalam hal penguasaan teknologi dan kesiapan menghadapi tantangan digital di tingkat lokal.

Dalam dimensi mitra kerja atau *partnerships* tersebut, untuk

mengetahui jelasnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Inne Roswianita Selaku Ketua Umum DPC IWAPI Kabupaten Bogor. Beliau mengatakan bahwa:

“Kami selalu membuka pintu bagi siapa pun yang ingin menjalin kerja sama atau kolaborasi dengan kami. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kami adalah organisasi nirlaba, sehingga kolaborasi menjadi salah satu upaya efektif untuk menjalankan program-program agar dapat terlaksana sesuai harapan, serta menghasilkan output yang sejalan dengan tujuan bersama. Selama ini, kami telah menjalin banyak kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Pemerintah Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Rumah Sakit, Kontraktor, dan lain sebagainya. Terkait program digitalisasi, kami juga pernah bekerja sama dengan Facebook dalam menyelenggarakan pelatihan bagi para anggota, mengingat pada saat itu aplikasi Facebook masih banyak digunakan oleh mereka.”

Berdasarkan atas pernyataan itu, menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi strategi utama DPC IWAPI Kabupaten Bogor dalam melaksanakan program-program pemberdayaan anggotanya, termasuk dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Sebagai organisasi nirlaba, IWAPI menyadari keterbatasan dalam sumber daya, baik dari segi anggaran maupun infrastruktur, sehingga kemitraan menjadi solusi strategis untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

Bentuk kemitraan yang dijalin pun cukup beragam, mulai dari lembaga pemerintah seperti Dinas Tenaga Kerja, institusi kesehatan seperti rumah sakit, hingga sektor swasta termasuk kontraktor dan bahkan platform digital global seperti Facebook. Pelatihan digitalisasi yang dilakukan bersama Facebook menjadi contoh konkret bagaimana IWAPI mampu memanfaatkan peluang kerja sama internasional untuk menjawab kebutuhan lokal anggota, khususnya dalam memperkuat literasi digital mereka.

Peran IWAPI dalam konteks ini tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai penghubung antara kebutuhan anggota dan sumber daya eksternal. Hal ini menguatkan posisi DPC IWAPI sebagai

organisasi perempuan yang adaptif, visioner, dan memiliki kemampuan membangun jaringan kerja strategis guna meningkatkan kapabilitas pelaku UMKM perempuan dalam menghadapi transformasi digital.

Lebih jauh, pendekatan kolaboratif ini mencerminkan praktik good governance dalam organisasi nirlaba, di mana keterlibatan berbagai aktor dimaksimalkan untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan. Selain meningkatkan kapabilitas digital anggota, kolaborasi juga membuka ruang partisipasi dan dialog antar sektor, yang menjadi penting dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berbasis komunitas.

Kemudian Wakil Ketua Umum Bidang IX CSR & Sosial dan sekaligus juga Anggota IWAPI, yaitu Ibu Rita menambahkan pernyataannya. Beliau mengatakan bahwa:

“Kami seringkali menjalin kemitraan dengan pihak luar dari mana pun mulai dari instansi pemerintah seperti Pemda atau dinas-dinas lalu perusahaan swasta dan lain sebagainya. Seringkali juga bukan kami yang mencari untuk diajak kerjasama melainkan pihak luar yang datang langsung ke kantor dan menawarkan adanya kegiatan kerja sama. Biasanya bentuk kegiatan yang dilakukan ketika menjalin kerjasama dengan pemerintah itu berbentuk sebagai kegiatan pelatihan. setiap pelaksanaan program kadangkala kami menjadi fasilitator atau perencanaan bersama. Tapi lebih sering jadi fasilitator contohnya seperti ketika dinas-dinas mengadakan adanya kegiatan bazaar yang membutuhkan berbagai UMKM maka kami siap untuk menyokong atau menyalurkan UMKM untuk kegiatan tersebut.”

Berdasarkan atas pernyataan tersebut, DPC IWAPI Kabupaten Bogor menunjukkan kapasitasnya sebagai organisasi yang terbuka dan responsif terhadap peluang kolaboratif dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa kemitraan yang dijalin tidak hanya bersifat satu arah atau inisiatif dari IWAPI saja, melainkan juga datang secara proaktif dari pihak luar yang melihat potensi IWAPI dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi.

Kemitraan ini seringkali diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan

kegiatan pelatihan atau partisipasi dalam program penguatan UMKM, seperti bazar yang difasilitasi oleh dinas-dinas terkait. Dalam konteks ini, DPC IWAPI Kabupaten Bogor tidak hanya bertindak sebagai peserta pasif, tetapi juga mengambil peran penting sebagai fasilitator, bahkan terkadang terlibat dalam tahap perencanaan program. Fungsi fasilitator ini memungkinkan DPC IWAPI Kabupaten Bogor untuk menyalurkan anggota-anggotanya, khususnya pelaku UMKM perempuan, ke dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa IWAPI memiliki posisi strategis dalam ekosistem pemberdayaan UMKM di tingkat daerah. Organisasi ini tidak hanya mampu membangun relasi kemitraan yang saling menguntungkan, tetapi juga dipercaya oleh pihak luar sebagai jembatan untuk menjangkau para pelaku usaha di tingkat akar rumput. Hal ini mempertegas peran IWAPI sebagai aktor sosial yang berperan aktif dalam memperkuat daya saing ekonomi perempuan, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin terdigitalisasi.

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu Wakil Ketua Umum Bidang I Organisasi, Keanggotaan & Kesekretariatan dan sekaligus juga anggota IWAPI, yaitu Ibu Netty. Beliau mengatakan bahwa:

“Kami memang sudah cukup sering berkolaborasi, baik dengan pemerintah daerah maupun pihak luar lainnya. Kami selalu terbuka dengan segala bentuk kerja sama yang tujuannya sejalan, terutama dalam mendukung pemberdayaan anggota. Banyak pelatihan yang telah kami selenggarakan itu berasal dari hasil kerja sama tersebut. Jadi, kolaborasi ini memang menjadi salah satu cara yang efektif untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas kegiatan yang kami adakan. Akan tetapi, walaupun kami terbuka dengan segala bentuk kerjasama, kami selalu memilah mana yang memang sesuai dengan visi dan misi organisasi serta menjadi kebutuhan anggota. Sehingga, kadangkala ketika terdapat proposal kerjasama yang masuk ke kami itu pasti kami rapatkan Kembali secara bersama untuk menentukan apakah dilanjutkan atau tidak”

Dari pernyataan tersebut, bisa diketahui bahwa DPC IWAPI Kabupaten Bogor menjalankan peran mitra kerja secara selektif, strategis, dan adaptif dalam pelaksanaan program-programnya, terutama dalam kegiatan pelatihan dan pemberdayaan UMKM perempuan. Hal ini dikarenakan, Keterbukaan terhadap kerja sama ditunjang oleh sistem penilaian internal yang memastikan bahwa setiap bentuk kemitraan benar-benar mendukung tujuan organisasi, terutama dalam pemberdayaan ekonomi anggota. Proses seleksi melalui rapat internal mencerminkan bentuk pengelolaan kemitraan yang partisipatif dan reflektif, selaras dengan prinsip *value based partnership* yang ditekankan oleh Lewis dan Kanji.

Namun demikian, keterbukaan IWAPI terhadap kerja sama dilakukan dengan prinsip selektivitas dan kesesuaian terhadap visi organisasi. Informan menegaskan bahwa setiap tawaran kerja sama akan dipertimbangkan kembali melalui rapat internal guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan anggota dan arah strategis organisasi. Pendekatan ini mencerminkan kematangan institusional, di mana IWAPI mampu menjalankan relasi kemitraan tanpa kehilangan arah dan kendali atas nilai-nilai yang mereka perjuangkan. Dalam perspektif Lewis dan Kanji, hal ini termasuk dalam aspek penting dari kemitraan yang reflektif, berimbang, dan tidak bersifat subordinatif, di mana NGO tetap menjaga kemandiriannya dalam setiap bentuk hubungan kerja sama.

Pendekatan yang dilakukan IWAPI juga menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya dipandang sebagai sarana memperoleh dukungan sumber daya, tetapi juga sebagai strategi untuk memperluas dampak, menjawab kebutuhan kontekstual anggota, dan menjaga keberlanjutan program. Hal ini memperkuat posisi DPC IWAPI Kabupaten Bogor sebagai organisasi yang mampu menjadi jembatan antara pelaku UMKM perempuan dengan ekosistem pembangunan yang lebih luas, serta sebagai aktor pembangunan yang cermat dalam membangun kemitraan strategis.

Lebih lanjut, Ibu inne menambahkan lembali penjelasannya terkait dengan kolaborasi dengan pihak luar. Beliau mengatakan bahwa:

“Biasanya, ketika kami berkolaborasi dengan pihak luar, kami membagi tugas sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing. Misalnya, jika kami mengalami kendala dalam hal

penyediaan tempat atau alat pelatihan, kami akan berdiskusi dengan mitra kerja untuk mengetahui apakah mereka dapat membantu memfasilitasi kebutuhan tersebut. Sementara itu, dari pihak IWAPI akan mengatur kebutuhan lainnya, seperti narasumber dan peserta pelatihan. Jadi, dalam pelaksanaannya kami saling melengkapi dan menyesuaikan peran sesuai kesepakatan. Setiap kali kami menghadapi hambatan atau tantangan, hal tersebut tidak menjadi sesuatu yang melemahkan kami. Justru, kami melihatnya sebagai kekuatan yang mendorong kami untuk terus bertahan dan bergerak maju. Dalam menghadapi kendala, kami biasanya mengutamakan komunikasi antarpihak untuk mencari solusi terbaik secara bersama-sama. Alhamdulillah, sampai saat ini, hubungan kemitraan yang kami bangun masih berjalan dengan sangat baik.

Hal ini dikonfirmasi dengan pernyataan salah satu Wakil Ketua Umum Bidang IX CSR & Sosial dan sekaligus juga Anggota IWAPI yaitu Ibu Rita. Beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menjalin kerja sama, tentu ada saja hambatan dan tantangan yang harus kami hadapi. Apalagi, kami ini hanyalah sebuah organisasi nirlaba yang tentunya memiliki keterbatasan di beberapa aspek. Oleh karena itu, ketika kami mendapatkan tawaran atau kesempatan untuk bekerja sama dengan pihak luar, kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan terbuka dalam menyampaikan kekurangan dari pihak kami, dan di saat yang sama kami juga mencari tahu apa saja keterbatasan dari pihak mitra. Dengan begitu, saat pelaksanaan kegiatan pelatihan, kami bisa saling melengkapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal seperti ini biasanya terjadi terutama ketika kami mencoba menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar, dan jujur saja, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi saya secara pribadi.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Bidang I Organisasi, Keanggotaan & Kesekretariatan dan sekaligus juga anggota

IWAPI, yaitu Ibu Netty. Beliau mengatakan bahwa:

“jika berbicara mengenai hambatan itu kami selalu mengalami dan itu merupakan hal yang wajar menurut saya. Hambatan yang seringkali kami hadapi itu berkaitan dengan kecepatan penangkapan materi oleh peserta pelatihan. Anggota IWAPI itu hampir keseluruhan merupakan orang-orang yang lanjut usia. Sehingga, memang dalam hal menangkap materi pelatihan terkait digitalisasi sedikit lambat dan ini juga menjadi tantangan bagi kami dan mitra. Hal ini dikarenakan, kami harus berusaha lebih keras untuk membuat para anggota menjadi paham. Selain itu, meskipun pelatihan telah diberikan kadangkala kami juga suka menemukan beberapa anggota yang masih belum menerapkan materi pelatihan kedalam usaha nya. Namun meski demikian, mereka tetap antusias dalam mengikuti pelatihan dan alhamdulillah mitra bisa memahami kondisi ini sehingga hubungan antara kami dengan mitra masih bisa tetap berjalan dengan baik.”

Berdasarkan atas pernyataan informan di atas, bisa diketahui bahwa IWAPI menunjukkan praktik kemitraan yang sehat melalui pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi dalam setiap kerja sama yang dijalin. Ketika menghadapi keterbatasan, seperti ketersediaan tempat atau fasilitas pelatihan, IWAPI tidak menutup diri, melainkan melakukan dialog dengan mitra kerja untuk mencari solusi bersama. Di sisi lain, IWAPI juga mengambil tanggung jawab penuh terhadap hal-hal yang menjadi kapasitasnya, seperti penyiapan peserta dan narasumber. Ini mencerminkan pola hubungan kemitraan yang berbasis kolaborasi dan kesalingan, bukan ketergantungan.

Selain itu, IWAPI juga menerapkan prinsip keterbukaan dan komunikasi sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan hubungan kemitraan. Baik Ibu Inne maupun Ibu Rita menekankan bahwa keterbatasan yang dimiliki organisasi tidak menjadi penghalang, tetapi justru menjadi landasan untuk membangun sinergi dengan pihak luar. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Lewis dan Kanji bahwa peran mitra kerja seharusnya tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses interaksi dan

pembentukan relasi yang setara dan responsif terhadap tantangan

Kegiatan pelatihan yang dikolaborasikan antara DPC IWAPI Kabupaten Bogor ini mendapatkan respon yang baik. Untuk mengetahui lebih jelasnya, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Novi selaku Anggota IWAPI. Beliau mengatakan bahwa:

“Saya sangat senang melihat kerjasama yang terjalin antara DPC IWAPI dengan Pemerintah Daerah atau Dinas-Dinas di Kabupaten Bogor atau pihak luar lainnya. Karena dengan adanya kerja sama ini pelatihan yang diberikan menjadi lebih profesional dan menghadirkan adanya narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selain pelatihan, kami juga butuh pendampingan lanjutan dan mitra yang bisa bantu dari sisi praktik, seperti pemasaran digital. Jadi kerja samanya bisa lebih terasa manfaatnya dan berkelanjutan”

Berdasarkan atas pernyataan informan di atas, terlihat bahwa kerja sama yang dilakukan DPC IWAPI Kabupaten Bogor dengan pemerintah daerah, dinas terkait, dan pihak eksternal lainnya memberikan dampak positif secara langsung bagi anggota, khususnya dalam peningkatan kualitas pelatihan. Kehadiran narasumber yang kompeten serta penyelenggaraan pelatihan yang lebih profesional menjadi hasil nyata dari kolaborasi tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif atau simbolik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam proses pemberdayaan anggota. Meskipun demikian, diperlukan pendampingan lanjutan serta evaluasi yang mendalam agar pelatihan yang telah diberikan dapat menghasilkan manfaat yang lebih optimal. Kebutuhan ini menjadi semakin penting mengingat mayoritas anggota IWAPI merupakan lansia, sehingga pendampingan yang intensif diperlukan guna memastikan mereka mampu mengikuti setiap tahapan program secara efektif.

Hasil eksplorasi penulis menunjukkan bahwa dimensi *mitra kerja* menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan program pemberdayaan pelaku UMKM perempuan oleh DPC IWAPI Kabupaten Bogor, khususnya melalui kegiatan pelatihan. Dalam praktiknya, DPC IWAPI tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai fasilitator dan penghubung

antara kebutuhan anggota dengan sumber daya eksternal. Kolaborasi yang dijalin bersifat lintas sektor, melibatkan pemerintah daerah, dinas-dinas terkait, lembaga swasta, hingga platform global seperti Facebook.

Kemitraan ini dijalankan bukan sekadar untuk memperkuat kapasitas internal organisasi, melainkan sebagai strategi untuk memperluas akses terhadap pelatihan yang relevan, meningkatkan kualitas narasumber, serta menciptakan ekosistem pemberdayaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan digitalisasi. Dalam konteks ini, IWAPI menunjukkan praktik kemitraan yang sehat dan saling melengkapi melalui pembagian peran yang jelas, di mana setiap pihak berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Keterbukaan IWAPI terhadap kerja sama pun diimbangi dengan selektivitas. Setiap tawaran kemitraan dinilai melalui rapat internal untuk memastikan kesesuaian dengan visi organisasi dan kebutuhan riil anggota. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *value based partnership* yang adaptif, reflektif, dan tidak subordinatif, sebagaimana dijelaskan oleh Lewis dan Kanji. Artinya, IWAPI tetap menjaga kemandirian kelembagaannya di tengah berbagai bentuk kolaborasi.

Dari sisi implementasi, pelatihan yang dilaksanakan hasil dari kemitraan ini mendapat respons positif dari anggota. Pelatihan menjadi lebih profesional, menghadirkan narasumber yang kompeten, dan menjawab kebutuhan nyata pelaku UMKM. Namun demikian, tantangan tetap ada, khususnya terkait dengan karakteristik anggota yang mayoritas adalah lansia. Hal ini membuat pendampingan intensif dan evaluasi berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak agar transfer pengetahuan dari pelatihan benar-benar dapat diterapkan secara praktis dalam pengembangan usaha.

Tabel 4.1 Hasil Observasi Penelitian

NO	DIMENSI PERAN ORGANISASI (DAVID LEWIS DAN NAZNEEN KANJI, 2009)	HASIL PENELITIAN
1.	Peran <i>Service Delivery</i> atau <i>Implementers</i>	Peran sebagai <i>service delivery</i> atau <i>implementers</i> yang dijalankan oleh DPC IWAPI Kabupaten Bogor dalam memberdayakan pelaku UMKM, khususnya perempuan, telah terlaksana dengan cukup baik dan optimal. Hal ini tercermin dari berbagai bentuk pelatihan yang diselenggarakan, seperti pelatihan permodalan melalui pemanfaatan QRIS untuk transaksi digital, pelatihan public speaking, serta pelatihan lainnya yang mendukung peningkatan literasi digital anggota. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kemampuan praktis anggota dalam mengelola dan mengembangkan usaha mereka. Respons positif dari para anggota menunjukkan bahwa peran pelaksana yang diemban oleh IWAPI memberikan kontribusi nyata dalam mendorong transformasi ekonomi

		perempuan di tingkat lokal, terutama dalam menghadapi tantangan era digitalisasi. Meskipun IWAPI menghadapi keterbatasan dana sebagai organisasi nirlaba, hal tersebut diatasi melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak swasta. Selain itu, IWAPI juga terbukti memiliki inisiatif progresif dalam merespons digitalisasi, dengan menjadi pelaksana pertama pelatihan berbasis digital di lingkungan IWAPI nasional.
2.	Peran Katalis atau <i>Catalyst</i>	Peran DPC IWAPI Kabupaten Bogor sebagai katalis dalam pemberdayaan pelaku UMKM perempuan telah dijalankan secara progresif dan relevan dengan tantangan zaman, khususnya di tengah arus digitalisasi. IWAPI tidak hanya memfasilitasi pelatihan dalam arti teknis, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan atau <i>agent of change</i> yang mendorong transformasi pola pikir dan kesiapan mental anggota untuk beradaptasi dengan era digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui pendekatan bertahap dan partisipatif, di mana IWAPI

		secara konsisten menyampaikan pesan-pesan mengenai pentingnya literasi digital dan penggunaan teknologi dalam pengembangan usaha. Transformasi ini tidak hanya tercermin dari peningkatan pengetahuan anggota, tetapi juga dari perubahan nyata dalam perilaku mereka, seperti mulai memanfaatkan media sosial untuk promosi maupun penggunaan aplikasi digital dalam pencatatan usaha. Meskipun terdapat tantangan internal seperti kesenjangan pemahaman terhadap materi digital, keterbatasan usia, serta tantangan eksternal berupa kondisi geografis yang sulit dijangkau, IWAPI mampu menghadapinya dengan strategi desentralisasi organisasi melalui pembentukan Korwil dan ranting, serta dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana monitoring dan komunikasi. Namun demikian, tantangan psikologis seperti ketakutan terhadap ulasan negatif dalam platform digital dan advokasi kebijakan masih
--	---	---

		menjadi hambatan yang perlu diperhatikan.
3.	Peran Mitra Kerja atau <i>Partnerships</i>	DPC IWAPI Kabupaten Bogor telah menjalankan peran sebagai mitra kerja secara strategis, adaptif, dan partisipatif dalam pemberdayaan pelaku UMKM perempuan di era digital. Kolaborasi yang dijalin bersama pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga eksternal lainnya tidak hanya bersifat administratif, melainkan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas pelatihan, akses terhadap narasumber yang kompeten, serta efektivitas program. DPC IWAPI juga menunjukkan kematangan kelembagaan melalui sikap selektif dan reflektif, yaitu hanya menerima kerja sama yang sesuai dengan visi, misi, dan kebutuhan anggota. Selain sebagai pelaksana, IWAPI juga berperan sebagai fasilitator dan jembatan antara anggota dan sumber daya eksternal. Praktik pembagian peran yang saling melengkapi serta komunikasi yang terjaga menjadi kunci dalam mempertahankan keberlanjutan hubungan kemitraan.

		Dampaknya dirasakan langsung oleh anggota melalui peningkatan kapasitas dan semangat partisipasi, menegaskan bahwa peran IWAPI sebagai mitra kerja benar-benar mendukung proses pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan.
--	--	--



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa DPC IWAPI Kabupaten Bogor memainkan peranan yang signifikan dalam pemberdayaan pelaku UMKM perempuan di era digitalisasi. Peran tersebut tercermin dalam tiga dimensi utama yang dikemukakan oleh David Lewis dan Nazneen Kanji, yaitu sebagai *service delivery* atau *implementer*, katalis atau *catalyst*, dan mitra kerja atau *partnerships*.

Dimensi pelaksana yang dilakukan DPC IWAPI sudah cukup baik. Kebutuhan akan adanya pelatihan terkait dengan public speaking, digital marketing hingga dengan literasi digital lainnya telah diwujudkan sebagaimana bentuk respon DPC IWAPI terhadap apa yang menjadi kebutuhan anggota. Sehingga, anggota dapat meningkatkan kapasitas baik dari segi usaha maupun diri para pelaku UMKM perempuan itu sendiri. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terkendala dengan biaya. Pada dimensi katalis, juga sudah cukup. Dimana DPC IWAPI berperan aktif mendorong adaptasi teknologi digital bagi anggotanya guna meningkatkan daya saing usaha. Peran visioner ini perlu didukung dengan monitoring intensif dan konsolidasi rutin agar pemberdayaan UMKM berjalan merata dan berkelanjutan. Meskipun masih terdapat kendala seperti tantangan internal dan eksternal.

Sementara, dimensi mitra kerja, sudah diterapkan dengan baik yangmana DPC IWAPI menjalin kerjasama atau berkolaborasi secara strategis baik dengan pihak eksternal maupun dengan pemerintah. Kerja sama yang selektif dan terbuka ini membantu mengatasi keterbatasan, meningkatkan kualitas pelatihan, serta memperluas jangkauan program pemberdayaan bagi anggota. Secara keseluruhan, DPC IWAPI cukup berhasil dalam mengimplementasikan ketiga peran dari David Lewis dan Nazneen Kanji. Meski menghadapi hambatan geografis, keterbatasan waktu, dan akses teknologi, IWAPI tetap menunjukkan ketangguhan kelembagaan serta semangat kolaboratif dalam menjalankan misi sosialnya.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

Penelitian ini memperkuat konsep David Lewis dan Nazneen Kanji tentang tiga dimensi peran NGO, dengan menunjukkan bahwa DPC IWAPI mampu menjalankan ketiganya secara simultan dan saling beririsan. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan dan menggali lebih dalam terkait dengan teori ini melalui penambahan dimensi baru, seperti inovasi digital atau kepemimpinan transformasional, serta menganalisis dampak jangka panjang kolaborasi NGO dan sektor privat.

5.2.2 Saran Praktis

1. Bagi DPC IWAPI Kabupaten Bogor, disarankan untuk terus memperkuat kapasitas internal organisasi, terutama dalam hal digitalisasi, serta kapasitas advokasi dan kebijakan. Selain itu, perlu pengembangan sistem monitoring yang lebih sistematis untuk memantau dampak program secara berkelanjutan.
2. Bagi pelaku UMKM anggota IWAPI, disarankan untuk lebih memperkuat literasi, mentalitas digital dan proaktif dalam mengikuti pelatihan dan memanfaatkan peluang kolaborasi agar tercipta kemandirian dan daya saing usaha yang lebih kuat di era digital. Terapkan juga hasil pelatihan ke praktik usaha agar dampak pemberdayaan lebih nyata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSATAKA

Buku :

- Ardianto, E. (2011). Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif. Bandung: Simbiosis Rekaman Media.
- Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Almansur, F., Ghony, M. D. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Lewis, D. (2001). *"The Management of Non-Governmental Development Organizations"*. UK: Aston Business School. Hlm. 1-239
- Sari, D.W. (2009). Sosiologi: Konsep & Teori. Bandung: PT Refka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Aromatica, D., Sudrajat, A. R. (2021). Teori Organisasi: Konsep, Struktur & Aplikasi. Banyumas: CV. Amerta Media.
- Sari, Eliana. (2006). Teori Organisasi: Konsep dan Aplikasi. Jakarta Timur: Jayabaya University Press.
- Fakih, M. (2016). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: InsistPress.
- Kartasasmitha, G. (1996). Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: PT Pusaka Cisendo.
- Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. De La Macca, Makassar.
- IWAPI. (2015). Peraturan dan Ketentuan Organisasi IWAPI. Jakarta: DPP IWAPI
- Sarwono, J. (2013). Strategi Melakukan Riset: Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan. Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Kusumastuti, D., et al. (2020). Peran Pengusaha Wanita dalam Pengembangan UMKM. Jakarta: Penerbit Ekonomi Kreatif
- Lewis, D., & Kanzi, N. (2009). Non-Governmental Organization and Development. London and New York: Routledge
- Ramadhan, M. (2021). *"Metode Penelitian"*. Cipta Media Nusantara, Surabaya.
- Pujastawa, I. B. G. (2016). Teknik wawancara dan observasi untuk pengumpulan bahan informasi. Universitas Udayana, 4.
- Ismah, I. (2005). Diskursus Gender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah. Jakarta: PSAP

- Soekanto, S. (2002). Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2015). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. (1997). Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Robbins, S. P. (2010). Manajemen. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Badu, S. Q., Djafri, N. (2017). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Zubaedi. (2013). Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal atau Artikel :

- Pertiwi, A. D., Septian, R. N., Prihantini, R. A. (2021). Peran Organisasi Kemahasiswaan dalam Membangun Karakter: Urgensi Organisasi Kemahasiswaan pada Generasi Digital. Universitas Pendidikan Indonesia. Aulad :Journal on Early Childhood. 4(3). Hal 107-115
- Prastowo, A. (2010). Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: DIVA Press.
- Suhita, A. L. (2023). Peran Dukungan Pemerintah dan Organisasi Inkubator Dalam Mensukseskan Perilaku Wanita Pengusaha Pada Indonesia Woman Entrepreneur Association (IWAPI) Jawa Barat. (Skripsi, Universitas Telkom, 2023). Diakses dari <https://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/187857/peran-dukungan-pemerintah-dan-organisasi-inkubator-dalam-mensukseskan-perilaku-wanita-pengusaha-pada-indonesia-woman-entrepreneur-association-iwapi-jawa-barat.html>
- Data Anggota IWAPI Kota Bogor. (2020). Profil DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Bogor: IWAPI
- Julika, R., Irawati, I. (2016). Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Mendorong Pembangunan Desa. *Jurnal Publik Corner*. 11(2), 7.
- Yuliyanti, R., Purbaningrum, D. G. (2022). Peran Non-Governmental Organization

- Pattiro Jakarta dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Universitas Muhammadiyah Jakarta. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*. 1(2). Hal 125-129.
- Wulan, R. M., Muktiali, M. (2013). Peran Non-Governmental Organization (GIZ dan LSM Bina Swadaya) Terhadap Klaster Susu Sapi Perah di Kabupaten Boyolali. Universitas Diponegoro. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 1(2). Hal 157-174.
- Budio, S. (2018). Komunikasi Organisasi: Konsep Dasar Organisasi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 23-30
- Wahyuni, T. A. (2020). *Identifikasi Motivasi Pada Anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Bogor*. Skripsi. Bandung: Universitas Telkom.
- Octhariany, T. W. N. et al. (2024). Peranan Wanita Pengusaha Dalam Berkolaborasi Dengan UMKM Di Era Digitalisasi. *Jurnal Teknobis: Teknologi, Bisnis dan Pendidikan*. 2(2), 287-295
- Winanto, S., Kelana, B., Ramadhina, A. L., Fariha, F. S., Thoriq, M. R., & Winza, F. M. (2022). UTILISASI DIGITAL MARKETING PADA UMKM DI IWAPI JAKARTA TIMUR. *SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3), 133-142.
- Damarwati, Y. S. (2016). Pemberdayaan Wanita Melalui IWAPI, Sebuah Langkah Menuju Kemandirian Perempuan Demi Terwujudnya Pengarusutamaan Gender. *Jurnal Holistik*, (17), 10
- Zakiyah. (2010). Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita. *Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan*, XVII, 1 (Januari-Juni)

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Website Internet :

- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2025). Banyaknya Industri Mikro dan Kecil menurut Kabupaten/Kota (Unit). <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzUyIzI=/banyaknya-usaha-mikro-dan-kecil-menurut-kabupaten-kota.html> (diakses pada 10 Juni)
- Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). Menteri PPPA Dorong Perempuan Berdaya Lewat Ekonomi

Syariah Berkelanjutan. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTUxMA==>. (diakses 12 Maret 2025)

Herman Effendi. (2024). IWAPI Perkuat Peran Perempuan Pengusaha di Era Digitalisasi. <https://beritakota.id/iwapi-perkuat-peran-perempuan-pengusaha-di-era-digitalisasi/>. (diakses 12 Maret 2025)

Lola Woetzel, et al. (2015). The power of parity: How advancing women's equality can add \$12 trillion to global growth. <https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth>. (diakses 16 April 2025)

Ronny Heraswadi. (2025). Perempuan dan UMKM (Kontribusi Bagi Indonesia). <https://www.rri.co.id/umkm/1270606/perempuan-dan-umkm-kontribusi-bagi-indonesia>. (diakses 12 Maret 2025)

Kabupaten Bogor Web Portal Resmi. (2024). Pj Bupati Bogor Sebut UMKM Kabupaten Bogor Harus Go Digital Serta Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bogor. <https://bogorkab.go.id/berita/detail-berita/e4a2e141-99d5-4ccc-af71-d1289f0eae50>. (diakses 10 Juni)



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pedoman Wawancara

No	Dimensi	Informan Kunci	Informan Utama	Informan Pendukung
1.	Pelaksana atau Implementers	1. Program pemberdayaan dan pelatihan apa saja yang telah dijalankan IWAPI dalam 2-3 tahun terakhir?	1. Apa saja bentuk program atau kegiatan digitalisasi yang sudah dilaksanakan oleh IWAPI bagi pelaku UMKM perempuan?	1. Pernahkah Ibu mengikuti pelatihan atau pendampingan dari DPC IWAPI Kabupaten Bogor terkait penggunaan teknologi dalam usaha? Jika ya, menurut Ibu, sejauh mana program tersebut membantu pengembangan usaha Ibu?
		2. Menurut Ibu, Bagaimana DPC IWAPI Kabupaten Bogor menjalankan program-program pemberdayaan UMKM perempuan di era digitalisasi? dan apakah telah sesuai dengan kebutuhan di masyarakat?	2. Menurut Ibu, bagaimana penyelenggaraan atau pelaksanaan dari program-program yang telah diselenggarakan DPC IWAPI?	2. Selama mengikuti kegiatan dari IWAPI, menurut Ibu, bagaimana kualitas sumber daya seperti tenaga pelatih, materi, dan fasilitas yang digunakan? Apakah dirasa cukup membantu?
		3. Menurut Ibu, bagaimana pengelolaan sumber daya seperti dana, tenaga pelatih, dan fasilitas teknologi dilakukan dalam pelaksanaan program pemberdayaan IWAPI? Apakah sumber daya tersebut sudah mencukupi?	3. Menurut Bapak/Ibu, apakah fasilitas dan dukungan yang disediakan IWAPI seperti pelatih, alat atau teknologi pelatihan sudah memadai dalam mendukung kegiatan pelatihan atau pendampingan usaha?	3. Apakah ada situasi di mana Bapak/Ibu merasa tidak dapat mengikuti program karena kendala tertentu, seperti informasi yang kurang, jadwal tidak sesuai, atau keterbatasan fasilitas?
		4. Menurut Ibu, apa saja yang menjadi tantangan DPC IWAPI dalam mengimplementasikan program dan		

		bagaimana cara DPC IWAPI mengatasi tantangan-tantangan tersebut?		
2.	Katalis atau Catalysts	1. Menurut Ibu, apa peran IWAPI dalam mendorong kesadaran digital atau transformasi usaha di kalangan anggota IWAPI?	1. Apakah Ibu, melihat adanya perubahan pola pikir atau sikap anggota IWAPI terhadap pemanfaatan teknologi digital setelah mengikuti program atau kegiatan yang diselenggarakan IWAPI? Bisa diceritakan contohnya?	1. Apakah Ibu merasa lebih sadar atau tertarik menggunakan teknologi digital dalam usaha setelah mengikuti kegiatan IWAPI? Bisa diceritakan bagaimana awalnya Ibu mulai tertarik atau belajar digital?
		2. Dari program atau upaya yang telah dilakukan IWAPI, Apakah Bapak/Ibu melihat adanya inisiatif baru yang muncul dari anggota setelah mengikuti program IWAPI, seperti memulai usaha berbasis digital atau membentuk komunitas belajar digital? Bisa diceritakan contohnya?	2. Bagaimana IWAPI memantau atau mendukung keberlanjutan dari inisiatif-inisiatif baru yang dilakukan anggota setelah mengikuti program pelatihan atau pendampingan?	2. Menurut pengamatan Ibu, apakah ada anggota IWAPI atau pelaku UMKM di lingkungan Ibu yang memulai inisiatif baru setelah mengikuti kegiatan IWAPI, seperti memperluas usaha secara digital atau membentuk komunitas belajar?
		3. Apakah DPC IWAPI Kabupaten Bogor turut mendorong advokasi kebijakan atau menyuarakan kepentingan perempuan pelaku UMKM di tingkat lokal? Jika ya, bisa dijelaskan contohnya?	3. Apakah DPC IWAPI menyediakan ruang advokasi atau forum diskusi bagi anggota untuk menyuarakan kebutuhan dan tantangan mereka terkait digitalisasi? Seperti apa bentuknya?	3. Apakah Ibu pernah mengikuti kegiatan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh DPC IWAPI terkait penggunaan teknologi digital dalam usaha? Jika ya, menurut Ibu apakah kegiatan tersebut membantu Ibu lebih memahami dan menerapkan digitalisasi dalam bisnis atau tidak?

3.	Mitra Kerja atau Partnerships	1. Apakah DPC IWAPI Kabupaten Bogor pernah menjalin kerjasama dengan instansi atau pihak luar dalam program pemberdayaan pelaku UMKM, khususnya terkait dengan digitalisasi usaha? Jika ya, bagaimana bentuk kerjasamanya?	1. Apakah IWAPI Kabupaten Bogor menjalin kemitraan dengan pihak lain (pemerintah, swasta, akademisi, dll.) dalam mendukung transformasi digital UMKM perempuan? Bisa dijelaskan bentuk kegiatannya?	1. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kegiatan IWAPI yang menghadirkan pihak luar seperti pelatih dari instansi pemerintah atau perusahaan digital? Menurut Bapak/Ibu, apakah itu bermanfaat?
		2. Apa Peran DPC IWAPI Kabupaten Bogor dalam kerja sama digitalisasi ini? Apakah hanya sebagai fasilitator, pelaksana, atau perencana bersama?	2. Menurut Ibu, apakah DPC IWAPI Kabupaten Bogor dilibatkan dalam perencanaan atau pelaksanaan program tersebut? Atau hanya sebagai fasilitator, pelaksana, atau perencana bersama?	2. Bagaimana pendapat Ibu tentang kerja sama IWAPI dengan pihak luar? Apakah program tersebut benar-benar membantu kebutuhan pelaku UMKM di lapangan?
		3. Menurut Ibu, Apakah terdapat hambatan atau tantangan yang dihadapi DPC IWAPI Kabupaten Bogor dalam menjalin kemitraan untuk program digitalisasi UMKM Perempuan?	3. Menurut Ibu, apakah DPC IWAPI Kabupaten Bogor menghadapi hambatan dalam menjalin kerja sama atau kemitraan untuk mendukung digitalisasi UMKM perempuan? Jika ya, tantangan seperti apa yang paling sering ditemui?	3. Apakah Ibu memiliki saran untuk DPC IWAPI Kabupaten Bogor agar kerja sama IWAPI dengan mitra bisa lebih efektif dalam membantu digitalisasi usaha UMKM perempuan?

Lampiran II Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN I

Informan Penelitian	: Hj. Inne Roswianita, S.E
Jabatan	: Ketua Umum Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Bogor
Tempat	: Gedung Graha Kadin Jalan Tegar Beriman Lantai 2
Hari dan Tanggal	: Senin, 21 Juli 2025

Peneliti : Program pemberdayaan dan pelatihan apa saja yang telah dijalankan IWAPI dalam 2-3 tahun terakhir?

Informan : Tentu, kalau ditanya seberapa banyak program pemberdayaan dan pelatihan yang sudah dijalankan DPC IWAPI Kabupaten Bogor dalam dua sampai tiga tahun terakhir, saya bisa katakan jumlahnya cukup banyak, ya. Bahkan dalam satu tahun saja, kami sudah merencanakan dan menjalankan berbagai program pemberdayaan dan pelatihan untuk anggota. Jadi memang cukup padat kegiatannya karena kami terus berupaya menjawab kebutuhan anggota, terutama di era yang serba digital ini.

Peneliti : Menurut Ibu, Bagaimana DPC IWAPI Kabupaten Bogor menjalankan program-program pemberdayaan UMKM perempuan di era digitalisasi? dan apakah telah sesuai dengan kebutuhan di masyarakat?

Informan : Menurut pandangan saya, apa yang telah dilakukan IWAPI sudah sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Berbicara mengenai digitalisasi, sejak awal masa kepemimpinan saya, saya sudah memiliki inisiatif untuk mengusulkan kepada DPP Pusat agar membuat program pemberdayaan atau pelatihan yang dapat menunjang kemampuan anggota dalam menghadapi era digital. Usulan tersebut kemudian direalisasikan, dan DPC IWAPI Kabupaten Bogor menjadi yang pertama menjalankannya. Hal ini karena saya melihat bahwa saat itu belum banyak pihak yang melihat pentingnya pelatihan digitalisasi, padahal saya melihat peluang besar di bidang tersebut.

Peneliti : Menurut Ibu, bagaimana pengelolaan sumber daya seperti dana, tenaga pelatih, dan fasilitas teknologi dilakukan dalam pelaksanaan program pemberdayaan IWAPI? Apakah sumber daya tersebut sudah mencukupi?

Informan : DPC IWAPI Kabupaten Bogor ini adalah organisasi nirlaba. Artinya, dalam menjalankan organisasi kami tidak berupaya untuk mencari keuntungan sehingga bila berbicara mengenai pengelolaan sumber daya seperti dana kami berupaya menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi ini dilakukan guna memperkuat kapasitas organisasi, memperluas jangkauan program, serta memastikan keberlanjutan kegiatan yang dijalankan. Melalui kerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, atau anggota agar dapat mengakses dukungan finansial, teknis, maupun jaringan yang lebih luas untuk mendukung pencapaian tujuan sosial yang telah ditetapkan.

Peneliti : Menurut Ibu, apa saja yang menjadi tantangan DPC IWAPI dalam mengimplementasikan program dan bagaimana cara DPC IWAPI mengatasi tantangan-tantangan tersebut?

Informan : Bagi kami, setiap tantangan justru kami anggap sebagai kekuatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menjalankan organisasi, tantangan pasti selalu ada dan bisa datang dari berbagai arah, baik dari internal maupun eksternal. Misalnya dari sisi internal, saat kami hendak menjalankan suatu program, terkadang muncul perbedaan pendapat antaranggota. Namun, kami selalu berupaya mencari solusi atau jalan tengah secara bersama-sama agar keputusan yang diambil tetap menjadi yang terbaik. Sementara itu, dari sisi eksternal, tantangan muncul saat kami menyelenggarakan program atau pelatihan yang mendukung digitalisasi, namun banyak peserta yang belum mampu mengaplikasikannya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti usia, kurangnya motivasi, atau karena memang belum sepenuhnya memahami materi yang diberikan.

Peneliti : Menurut Ibu, apa peran IWAPI dalam mendorong kesadaran digital atau transformasi usaha di kalangan anggota IWAPI?

Informan : Menurut pandangan saya, IWAPI merupakan organisasi yang berupaya menjadi wadah dan fasilitator bagi setiap anggotanya untuk terus berkembang. Saat ini, kita tidak bisa menutup mata terhadap perkembangan digitalisasi yang semakin pesat. Oleh karena itu, kami terus mendorong para anggota untuk melek digital dan mampu

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun ada yang belum memahami, kami siap memberikan pendampingan melalui pelatihan yang akan kami selenggarakan.

Peneliti : Dari program atau upaya yang telah dilakukan DPC IWAPI, Apakah Ibu melihat adanya inisiatif baru yang muncul dari anggota setelah mengikuti program DPC IWAPI, seperti memulai usaha berbasis digital atau membentuk komunitas belajar digital? Bisa diceritakan contohnya?

Informan : Ya, setelah upaya yang kami lakukan untuk anggota alhamdulillahnya hal tersebut terlihat dari *progress* anggota. Banyak diantara anggota yang mulai mengaplikasikan materi pelatihan kedalam usahanya. Seperti salah satunya kegiatan pelatihan yang memuat materi mengenai digital marketing dan public speaking. Setelah pelatihan, mereka mencoba untuk mengaplikasikannya dengan cara mempromosikan produknya melalui media sosial seperti live di beberapa platform. Tentu ini menjadi perkembangan yang sangat baik ya. Namun, memang terdapat beberapa anggota yang tidak mengaplikasikannya. Ini tentu menjadi catatan bagi kami untuk terus melakukan evaluasi dan pendekatan yang lebih efektif agar pelatihan yang kami berikan benar-benar memberikan dampak nyata

Peneliti : Apakah DPC IWAPI Kabupaten Bogor turut mendorong advokasi kebijakan atau menyuarkan kepentingan perempuan pelaku UMKM di tingkat lokal? Jika ya, bisa dijelaskan contohnya?

Informan : Sebenarnya, organisasi kami itu pada dasarnya tidak bergerak di ranah politik, ya. Jadi, kami juga tidak secara langsung mendorong advokasi kebijakan ke pemerintah. Paling tidak, kami hanya bisa menyampaikan masukan atau saran, berdasarkan apa yang kami lihat langsung di lapangan dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Itu pun biasanya kami sampaikan saat ada kesempatan kerja sama atau kolaborasi dengan pihak pemerintah, dan sifatnya hanya sebatas saran saja.

Peneliti : Apakah DPC IWAPI Kabupaten Bogor pernah menjalin kerjasama dengan instansi atau pihak luar dalam program pemberdayaan pelaku UMKM, khususnya terkait dengan digitalisasi usaha? Jika ya, bagaimana bentuk kerjasamanya?

Informan : Tentu, kami selalu membuka pintu bagi siapa pun yang ingin menjalin kerja sama atau kolaborasi dengan kami. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kami adalah organisasi nirlaba, sehingga

kolaborasi menjadi salah satu upaya efektif untuk menjalankan program-program agar dapat terlaksana sesuai harapan, serta menghasilkan output yang sejalan dengan tujuan bersama. Selama ini, kami telah menjalin banyak kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Pemerintah Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Rumah Sakit, Kontraktor, dan lain sebagainya. Terkait program digitalisasi, kami juga pernah bekerja sama dengan Facebook dalam menyelenggarakan pelatihan bagi para anggota, mengingat pada saat itu aplikasi Facebook masih banyak digunakan oleh mereka.

Peneliti : Apa Peran DPC IWAPI Kabupaten Bogor dalam kerja sama digitalisasi ini? Apakah hanya sebagai fasilitator, pelaksana, atau perencana bersama?

Informan : Ketika melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi seringkali kami berbagi tugas. Bisa sebagai fasilitator, pelaksana maupun perencana bersama. Hal ini dilakukan agar setiap kekurangan yang ada dapat tertutupi dengan kelebihan yang masing-masing miliki.

Peneliti : Menurut Ibu, Apakah terdapat hambatan atau tantangan yang dihadapi DPC IWAPI Kabupaten Bogor dalam menjalin kemitraan untuk program digitalisasi UMKM Perempuan?

Informan : Dalam menjalin kemitraan, hambatan dan tantangan tentu selalu ada. Namun, hal tersebut bukanlah sesuatu yang membuat kami kesulitan, justru menjadi kekuatan bagi kami untuk terus bertahan dan bergerak maju. Ketika menghadapi hambatan, kami biasanya saling berkomunikasi untuk mencari solusi terbaik. Alhamdulillah, hingga saat ini hubungan kemitraan yang terjalin masih berjalan dengan sangat baik.

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN II

Informan Penelitian	: Hj. Netty Sulastri
Jabatan	: Wakil Ketua Umum I Bidang Organisasi, Keanggotaan & Kesekretariatan
Tempat	: <i>Zoom Meeting</i>
Hari dan Tanggal	: Rabu, 23 Juli 2025

Peneliti : Apa saja bentuk program atau kegiatan digitalisasi yang sudah dilaksanakan oleh IWAPI bagi pelaku UMKM perempuan?

Informan : Saat ini dan berapa waktu kebelakang, IWAPI sudah menyelenggarakan banyak kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan digitalisasi. program yang sudah dilakukan IWAPI terkait dengan digitalisasi antara lain dengan mengadakan pelatihan entrepreneur yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam hal Public Speaking, digital marketing hingga dengan pembukuan. Dimana kegiatan-kegiatan ini kami selenggarakan dengan bekerjasama dengan Dispora. Selain itu, kami juga setiap minggunya selalu mengadakan kegiatan diskusi di hari jum'at yang membahas mengenai digital marketing bersama dengan Bank Jabar. Kegiatan pelatihan ini tidak hanya ditujukan untuk anggota IWAPI saja melainkan kami juga mengajak putra dan putri pengurus atau anggota IWAPI untuk ikut kegiatan pelatihan.

Peneliti : Menurut Ibu, bagaimana penyelenggaraan atau pelaksanaan dari program-program yang telah diselenggarakan DPC IWAPI?

Informan : Alhamdulillah, menurut saya kegiatan yang diselenggarakan sudah berjalan dengan baik walaupun memang terdapat beberapa hambatan tapi bisa terlaksana dengan baik.

Peneliti : Menurut Ibu, apakah fasilitas dan dukungan yang disediakan IWAPI seperti pelatih, alat atau teknologi pelatihan sudah memadai dalam mendukung kegiatan pelatihan atau pendampingan usaha?

Informan : Insyaallah sudah. Untuk pelatihan yang diselenggarakan dengan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait misalnya Dispora itu seringkali kami berbagai tugas dengan pihak yang berkolaborasi agar apa yang dibutuhkan bisa disediakan. Seringkali memang kegiatan pelatihan yang berkolaborasi dengan Dispora dilaksanakan di hotel dan fasilitas seperti penginapa atau akomodasi itu telah disediakan. Untuk narasumber kadangkala kami mendatangkan narasumber dari anggota IWAPI itu sendiri yang memang ahli di bidangnya atau sebaliknya.

- Peneliti :** Apakah Ibu, melihat adanya perubahan pola pikir atau sikap anggota IWAPI terhadap pemanfaatan teknologi digital setelah mengikuti program atau kegiatan yang diselenggarakan IWAPI? Bisa diceritakan contohnya?
- Informan :** Alhamdulillah, sudah ada dan terlihat perubahannya. Perubahan ini saya lihat dari beberapa anggota yang menerapkan materi pelatihan kedalam usahanya. Seperti melakukan kegiatan promosi di media sosial untuk menarik banyak konsumen. Selain itu juga, setelah melakukan pelatihan kami juga melakukan kegiatan monitoring atau pemantauan. Biasanya kegiatan monitoring ini dilakukan juga oleh bidang pelatihan terhadap peserta pelatihan. Tentunya hal ini bertujuan agar setiap *progress* dari setiap anggota dapat terlihat dan kekurangannya bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kami.
- Peneliti :** Bagaimana IWAPI memantau atau mendukung keberlanjutan dari inisiatif-inisiatif baru yang dilakukan anggota setelah mengikuti program pelatihan atau pendampingan?
- Informan :** Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kegiatan pelatihan biasanya dilakukan dari bidang pelatihan itu sendiri. Dan pemantauan dilakukan secara langsung dengan memonitor ke tiap-tiap anggota melalui perwakilan yang dilaporkan secara berkala melalui group *whatsapp*. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pemantauan. Selain itu juga, setiap korwil selalu melakukan pemantauan terhadap wilayah yang berada dibawah wewenangannya. Seperti saya yang memegang korwil 5 dimana korwil tersebut mencakup 9 kecamatan dan hanya 2 kecamatan yang saat ini aktif. 7 dari 9 kecamatan itu sudah periode kedua ibu ketua kegiatannya cenderung pasif atau vakum. Hal ini dikarenakan, saya yang terkendala tidak adanya mobilisasi sehingga untuk melakukan konsolidasi dengan beberapa wilayah tersebut tidak bisa dilaksanakan. Sehingga, kendalanya dalam hal ini itu terkait dengan jangkauan lokasi yang terlalu jauh.
- Peneliti :** Apakah DPC IWAPI menyediakan ruang advokasi atau forum diskusi bagi anggota untuk menyuarakan kebutuhan dan tantangan mereka terkait digitalisasi? Seperti apa bentuknya?
- Informan :** Untuk ruang advokasi atau forum diskusi biasanya kami lakukan di kantor dan ketika forum tersebut berlangsung para anggota dipersilahkan untuk melaporkan atau melakukan diskusi secara langsung dengan ibu Ketua.
- Peneliti :** Apakah IWAPI Kabupaten Bogor menjalin kemitraan dengan pihak lain (pemerintah, swasta, akademisi, dll.) dalam mendukung transformasi digital UMKM perempuan? Bisa dijelaskan bentuk kegiatannya?
- Informan :** Ada. Kebetulan kami melakukan kemitraan dengan berbagai pihak dalam menunjang peningkatan kapasitas UMKM terkait dengan transformasi digital seperti menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, beberapa dinas sampai dengan Universitas IPB. Untuk bentuk kegiatannya biasanya berbentuk pelatihan

public speaking, digital marketing atau berbagai pelatihan lain yang menjadi kebutuhan UMKM dalam peningkatan kapasitas di era digitalisasi ini.

Peneliti : Menurut Ibu, apakah DPC IWAPI Kabupaten Bogor dilibatkan dalam perencanaan atau pelaksanaan program tersebut? Atau hanya sebagai fasilitator, pelaksana, atau perencana bersama?

Informan : Ya, kami dilibatkan dalam perencanaan bersama. Namun, kangkara tidak hanya dilibatkan sebagai perencanaan bersama tetapi juga kadangkala sebagai pihak yang terlibat sebagai fasilitator. Seperti misalnya dinas membutuhkan adanya narasumber dari IWAPI maka kami bersedia untuk memnuhinya ataupun dinas membutuhkan adanya peserta UMKM maka kami pun siap untuk menyalurkan atau memfasilitasinya.

Peneliti : Menurut Ibu, apakah DPC IWAPI Kabupaten Bogor menghadapi hambatan dalam menjalin kerja sama atau kemitraan untuk mendukung digitalisasi UMKM perempuan? Jika ya, tantangan seperti apa yang paling sering ditemui?

Informan : Tentu saja jika berbicara mengenai hambatan itu kami selalu mengalami dan itu merupakan hal yang wajar menurut saya. Hambatan yang seringkali kami hadapi itu berkaitan dengan kecepatan penangkapan materi oleh peserta pelatihan. Anggota IWAPI itu hampir keseluruhan merupakan orang-orang yang lanjut usia. Sehingga, memang dalam hal menangkap materi pelatihan terkait digitalisasi sedikit lambat dan ini juga menjadi tantangan bagi kami dan mitra. Hal ini dikarenakan, kami harus berusaha lebih keras untuk membuat para anggota menjadi paham. Selain itu, meskipun pelatihan telah diberikan kadangkala kami juga suka menemukan beberapa anggota yang masih belum menerapkan materi pelatihan kedalam usaha nya. Namun meski demikian, mereka tetap antusias dalam mengikuti pelatihan dan alhamdulillah mitra bisa memahami kondisi ini sehingga hubungan antara kami dengan mitra masih bisa tetap berjalan dengan baik.

TRANSKRIP WAWANCARA

INFORMAN IV

Informan Penelitian	: Rita Wahyuni, S.Ikom
Jabatan	: Wakil Ketua Umum IX CSR & Sosial
Tempat	: Perumahan Taman Cimanggu Yasmin, Bogor
Hari dan Tanggal	: Kamis, 24 Juli 2025

Peneliti : Apa saja bentuk program atau kegiatan digitalisasi yang sudah dilaksanakan oleh IWAPI bagi pelaku UMKM perempuan?

Informan : Kalau berbicara mengenai program serta kegiatan yang berkaitan dengan digitalisasi, DPC IWAPI Kab. Bogor banyak sekali menyelenggarakan kegiatan untuk setiap anggota. Seperti kemarin pernah kita mengadakan pelatihan mengenai digital marketing dan public speaking. Menurut, saya juga kegiatan pelatihan public speaking itu sangat penting ya bagi pelaku UMKM. Karena saya melihat kadangkala banyak sekali anggota yang masih belum memiliki public speaking yang baik dan benar. Kalau public speaking saja masih belum bisa maka bagaimana mereka bisa menawarkan atau memasarkan produknya secara baik dan luas. Walaupun yaa bisa saja produk tersebut dipasarkan hanya dengan memasang foto di media sosial.

Peneliti : Menurut Ibu, bagaimana penyelenggaraan atau pelaksanaan dari program-program yang telah diselenggarakan DPC IWAPI?

Informan : Dalam penyelenggaraan berbagai program yang telah dilaksanakan, IWAPI selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan untuk setiap anggotanya. Semisal saja anggota merasa membutuhkan adanya pelatihan yang berhubungan dengan digital marketing ya kami berusaha untuk merealisasikannya. Karena moto IWAPI ialah untuk memajukan UMKM. Dan selama ini alhamdulillah dapat diselenggarakan dengan sangat baik.

Peneliti : Menurut Bapak/Ibu, apakah fasilitas dan dukungan yang disediakan IWAPI seperti pelatih, alat atau teknologi pelatihan sudah memadai dalam mendukung kegiatan pelatihan atau pendampingan usaha?

Informan : IWAPI ini kan organisasi nirlaba yaa jadi kami berusaha untuk memaksimalkan segala bentuk potensi yang ada. Semisalnya, untuk mendatangkan pembicara itu pasti membutuhkan adanya anggaran atau biaya. Kadangkala solusinya ialah dengan menghadirkannya melalui kerjasama dengan pihak luar atau mendatangkan narasumber dari anggota IWAPI itu sendiri.

- Peneliti :** Apakah Ibu, melihat adanya perubahan pola pikir atau sikap anggota IWAPI terhadap pemanfaatan teknologi digital setelah mengikuti program atau kegiatan yang diselenggarakan IWAPI? Bisa diceritakan contohnya?
- Informan :** Ya saya melihat itu. Setelah kegiatan pelatihan ini dilaksanakan saya banyak melihat adanya pola pikir yang berubah menjadi aksi nyata yang dilakukan oleh anggota IWAPI. Dan jujur ini membuat saya sangat senang. Karna dengan adanya pola pikir yang baru ini memunculkan adanya kemauan serta semangat untuk perubahan yang lebih baik. Namun, ada juga yang telah diberikan pelatihan memang tidak diterapkan dalam kegiatan usahanya. Biasanya hal ini dikarenakan faktor usia dan kecepatan dalam penangkapan materi.
- Peneliti :** Bagaimana IWAPI memantau atau mendukung keberlanjutan dari inisiatif-inisiatif baru yang dilakukan anggota setelah mengikuti program pelatihan atau pendampingan?
- Informan :** Perlu diketahui bersama bahwa DPC IWAPI Kab.Bogor ini membawahi beberapa kecamatan kurang lebih sekitar 40 kecamatan yang ada di kabupaten bogor. Sejujurnya untuk menggapai itu semua memang tidaklah mudah. Oleh karena itu, DPC IWAPI membentuk adanya Korwil atau Koordinator Wilayah yang bertugas untuk melakukan pemantauan, pengawasan hingga dengan bertanggung jawab atas wilayah yang dipegangnya. Secara keseluruhan, DPC IWAPI ini total memiliki 6 korwil dan saya adalah salah satu anggota sekaligus ketua korwil 5. Dengan adanya korwil ini tentu membantu IWAPI dalam menjangkau serta memberikan pendampingan untuk setiap anggota nya yang berada di berbagai wilayah dan ini menjadi upaya yang efektif untuk dilakukan. Pemantauan terhadap anggota yang telah diberikan pelatihan ataupun pendampingan akan masuk kedalam laporan pertanggung jawaban yang nantinya akan dilaporkan pada saat rapat yang diselenggarakan setiap sebulan sekali. Hal ini dilakukan agar ibu ketua IWAPI mengetahui bagaimana progress dan kebutuhan dari setiap anggotanya.
- Peneliti :** Apakah DPC IWAPI menyediakan ruang advokasi atau forum diskusi bagi anggota untuk menyuarakan kebutuhan dan tantangan mereka terkait digitalisasi? Seperti apa bentuknya?
- Informan :** Ada. Kami memiliki divisi hukum yang bertanggung jawab akan hal ini. Tapi menurut saya itu masih belum berjalan secara efektif. Sehingga, untuk menyuarakan kebutuhan atau tantangan setiap anggota terkait dengan digitalisasi biasanya kami lakukan ketika forum diskusi biasa saja.
- Peneliti :** Apakah IWAPI Kabupaten Bogor menjalin kemitraan dengan pihak lain (pemerintah, swasta, akademisi, dll.) dalam mendukung transformasi digital UMKM perempuan? Bisa dijelaskan bentuk kegiatannya?
- Informan :** Yaa. Kami seringkali menjalin kemitraan dengan pihak luar dari mana pun mulai dari instansi pemerintah seperti Pemda atau dinas-dinas lalu perusahaan swasta